



LKIP 2019

Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah

Provinsi Lampung



**RAKYAT LAMPUNG
BERJAYA**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2019 merupakan tahun peralihan masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Lampung sehingga dalam tahun ini diberlakukan 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan 2019-2024. Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikatornya masing-masing menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/919/B.XII/HK/2017 tentang Penyempurnaan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019 – 2024 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.



Berdasarkan RPJMD 2015-2019 maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 perincian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Tujuan 1	Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3	Sasaran 1	indikator 1
			Sasaran 2	indikator 2, 3
			Sasaran 3	indikator 4
			Sasaran 4	indikator 5
			Sasaran 5	indikator 6
			Sasaran 6	indikator 7
			Sasaran 7	indikator 8
2	Tujuan 2	indikator 4, 5, 6, 7, 8, 9	Sasaran 8	indikator 9,10
			Sasaran 9	indikator 11, 12, 13
			Sasaran 10	indikator 14
3	Tujuan 3	indikator 10	Sasaran 11	indikator 15, 16
	Tujuan 4	indikator 11	Sasaran 12	indikator 17
	Tujuan 5	indikator 12	Sasaran 13	indikator 18, 19
	Tujuan 6	indikator 13	Sasaran 14	indikator 20
4	Tujuan 7	indikator 14	Sasaran 15	indikator 21
5	Tujuan 8	indikator 15 indikator 16	Sasaran 16	indikator 22
			Sasaran 17	indikator 23

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2020.

Setelah masa peralihan Kepala Daerah Provinsi Lampung maka RPJMD 2019-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 perincian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Tujuan 1	indikator 1	Sasaran 1	indikator 1, 2
	Tujuan 2	indikator 2	Sasaran 2	indikator 3
2	Tujuan 3	indikator 3	Sasaran 3	indikator 4
			Sasaran 4	indikator 5
			Sasaran 5	indikator 6, 7
3	Tujuan 4	indikator 4 indikator 5	Sasaran 6	indikator 8
			Sasaran 7	indikator 9
			Sasaran 8	indikator 10, 11
			Sasaran 9	indikator 12, 13, 14, 15
			Sasaran 10	indikator 16
4	Tujuan 5	indikator 6 indikator 7	Sasaran 11	indikator 17
			Sasaran 12	indikator 18
			Sasaran 13	indikator 19
			Sasaran 14	indikator 20
5	Tujuan 6	indikator 8 indikator 9 indikator 10 indikator 11 indikator 12	Sasaran 15	indikator 21, 22, 23, 24
			Sasaran 16	indikator 25
			Sasaran 17	indikator 26, 27
			Sasaran 18	indikator 28
			Sasaran 19	indikator 29
			Sasaran 20	indikator 30
			Sasaran 21	indikator 31
6	Tujuan 7	indikator 13	Sasaran 22	indikator 32
			Sasaran 23	indikator 33

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2020.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka interval pengukuran kinerja sesuai dengan realisasi kinerja dan kategorinya adalah sebagai berikut 90≤100 (sangat tinggi); 76≤90 (tinggi); 66≤75 (sedang); 51≤65 (rendah); ≤50 (sangat rendah).

Hasil pengukuran kinerja melalui capaian tujuan dan sasaran RPJMD 2015-2019 terhadap masing-masing indikatornya pada setiap misi adalah sebagai berikut:

Bagan 1 Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019



Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2020.

Sedangkan Hasil pengukuran kinerja melalui capaian sasaran RPJMD 2019-2024 terhadap masing-masing indikatornya pada setiap misi adalah sebagai berikut:

Bagan 2 Capaian Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Maret 2020.

Berdasarkan bagan capaian tujuan dan sasaran di atas maka capaian secara terperinci dapat dilihat melalui data sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

No.	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Realisasi	Capaian	No.	IKU Provinsi Lampung	Kinerja 2019		
							Target	Realisasi	Capaian
1	2	4	5	6	8	9	14	15	16
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,27	94,11	1	Laju pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (%)	4,48	4,07	90,85
2	Indeks Gini (koefisien)	0,36	0,331	108,76	2	Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan (%)	7,46	10,1	135,39
3	Angka Kemiskinan (%)	12,36	12,62	98,10	3	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	4,5	7,8	173,33
					4	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	5,24	9	171,76
					5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,17	4,03	103,47
					6	Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga konstan (%)	14,56	4,62	31,73
					7	Rata-rata pengeluaran wisatawan (juta)	1375	1.368	99,49
8	Laju pertumbuhan PAD (%)	3,28	4,38	133,54					
4	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi (%)	85	77,23	90,86	9	Kondisi kemantapan jalan provinsi (%)	85	77,23	90,86
5	Tingkat Penyediaan Infrastruktur Irigasi (%)	100	94,23	94,23	10	Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian (%)	100	94,23	94,23
6	Tingkat Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%)	100	73,3	73,3	11	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%)	100	73,3	73,3
7	Tingkat kawasan pemukiman kumuh (%)	0,53	0,53	100%	12	Tingkat kawasan permukiman kumuh (%)	0,53	0,53	100%
8	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah) (%)	100	64,63	64,63	13	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah) (%)	100	64,63	64,63
9	Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	83,47	95,89	114,88	14	Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	83,47	95,89	114,88
10	angka rata-rata lama sekolah (Thn)	7,7	7,82	101,56	15	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	7,7	7,82	101,56
					16	Angka harapan lama sekolah (Thn)	12,7	12,61	99,29
11	angka harapan hidup (Thn)	72	70,18	97,47	17	Angka Harapan Hidup	72	70,18	97,47
12	predikat annugrah parahita ekapraya (predikat)	Utama	utama	100	18	Predikat Anugrah Parahita Kapraya (predikat)	Utama	Utama	100
					19	Provinsi Layak Anak (Kabupaten)	5	7	140
13	peringkat penyelesaian konflik sosial tingkat nasional (peringkat)	terbaik	Pertama	93	20	Peringkat Penyelesaian Konflik Sosial Tingkat Nasional (Peringkat)	Terbaik Nasional	Pertama	93%
14	indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) (indeks)	62	59,28	95,61	21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	62	59,28	95,61
15	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (predikat)	BB	B	91,14%	22	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (predikat)	BB	B	91,14
16	opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah (opini)	WTP	WTP	100	23	Opini BPK terhadap Pengelola Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	100

Sumber data: Olahan Biro Organisasi, Maret 2020

Sedangkan perincian capaian sasaran berdasarkan RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2019 (Okt-Des 2019)			Ket	target tahun ke-5
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	68,5	73,1	106,72	-	73
2	Tingkat Kriminalitas	Angka	75,6	71,9	105,15	-	92,15
3	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	70	68,67	98,10	-	76
4	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	Angka	45	50	111,11	-	100
5	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	100	-	A
6	Opini BPK/WTP	Opini	WTP	WTP	100	-	WTP
7	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	100	-	A
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	C	B	108,14	-	A
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	72	70,18	97,47	-	72,48
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,55	12,61	100,48	-	12,92
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,7	7,82	101,56	-	8,2
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90,8	90,39	99,55	Data 2018	91,95
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	64,03	63,82	99,67	Data 2018	65,08
14	Jumlah Kab/Kota Layak Anak	Angka	5	7	140	-	15
15	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	Persen	1,86	0,72	39	-	4,49
16	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	Peringkat	4	12	33	POPNAS	3
17	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	Angka	4,17	4,03	103,47	-	3,48
18	Indeks Konektivitas	Indeks	6,01	6,01	100	Data 2018	6,67
19	Rasio Elektrifikasi RumahTangga	Persen	93	97,65	105	Maret 2019	98
20	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP>2	Persen	33	29	87,88	Data 2018	55
21	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman	Persen	71,5	73,3	102,52	-	80,34
22	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	Persen	66,41	52,48	79,02	Data 2018	78,68
23	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Persen	0,52	0,53	101,92	-	0,37
24	Persentase Rumah tidak Layak huni	Persen	4,5	4,67	96,36	-	1,03
25	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	0,93	1,34	144,09	-	3,19
26	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,46	8,26	110,72	-	6,33
27	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,24	7,23	137,98	-	10,73
28	Laju Inflasi	Inflasi	3	3,44	87,21	-	3,0-3,5
29	Angka Kemiskinan	Persen	12	12,3	97,56	-	9,18
30	Indeks Williamson	Indeks	0,21	0,245	85,71	-	0,19
31	PDRB perkapita (Juta)	Indeks	42,94	42,69	99,42	-	56
32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,13	59,28	103,65	-	63,32
33	Indeks Resiko Bencana	Indeks	144,9	144,9	100	-	143,1

Sumber data: Olahan Biro Organsiasi, Maret 2020.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat sehingga penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Lampung Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

LKIP Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan atas capaian tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung selama kurun waktu satu tahun dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Tahun 2019 merupakan tahun peralihan dimana dalam tahun ini terdapat 2 dokumen perencanaan yang diimplementasikan. Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2019 telah banyak membuahkan keberhasilan pembangunan di berbagai sektoral. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Berkenaan dengan itu, kami berharap melalui penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan agar dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Telukbetung, Maret 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG	2
1.3 ISU STRATEGIS	9
1.4 LANDASAN HUKUM	14
1.5 INOVASI PROVINSI LAMPUNG	15
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	18
A. RPJMD 2015-2019	19
1. VISI DAN MISI	19
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	20
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	24
B. RPJMD 2019-2024	25
1. VISI DAN MISI	26
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	27
3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	42
4. JANJI KERJA GUBERNUR	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	52
A. CAPAIAN TUJUAN DAN IKU RPJMD 2015-2019	19
B. CAPAIAN IKU RPJMD 2019-2024	57
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	59
A. RPJMD 2015-2019	61
B. RPJMD 2019-2024	88
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	112
BAB IV PENUTUP	117
LAMPIRAN	121



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Bagan 1 Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	-- iv
Bagan 2 Capaian Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	v
Gambar 1.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja	1
Gambar 1.2 Piramid Sasaran Pembangunan	2
Gambar 1.3 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung	3
Gambar 1.4 Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	4
Gambar 1.5 Pola Hubungan Kerja Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung	7
Gambar 1.6 Pola Hubungan Kerja satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung	8
Gambar 1.7 Isu Strategis Refleksi Akhir Tahun 2019	13
Gambar 1.8 e-Samsat Provinsi Lampung	15
Gambar 1.9 Aplikasi PKB Bapenda Provinsi Lampung	15
Gambar 1.10 SAMOLNAS Provinsi Lampung	16
Gambar 1.11 Konsep smart village	16
Gambar 2.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	19
Gambar 2.2 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	26
Gambar 3.1 Pertumbuhan ekonomi se-Sumatera	62
Gambar 3.2 Gini Rasio Provinsi Lampung dan Nasional	63
Gambar 3.3 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung	64
Gambar 3.4 Produksi Pertanian, Peternakan Provinsi Lampung	72
Gambar 3.5 Produksi Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	73
Gambar 3.6 Koorduinasi Lembaga Non Pemerintah	89
Gambar 3.7 Koordinasi FORKOPIMDA Provinsi Lampung	90
Gambar 3.8 Pembangunan Kebudayaan	91
Gambar 3.9 Penataan Aparatur	92
Gambar 3.10 Pengelolaan Keuangan	93
Gambar 3.11 Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung	94
Gambar 3.12 Pelayanan Publik	95
Gambar 3.13 IPM Lampung	96
Gambar 3.14 Pengangguran Terbuka	100
Gambar 3.15 Pembangunan Infrastruktur	100
Gambar 3.16 Perkembangan konektivitas	101
Gambar 3.17 Kawasan Kumuh	104
Gambar 3.18 Produksi Sektor Pertanian	105
Gambar 3.19 Industri Pengolahan	106
Gambar 3.20 Laju Inflasi Lampung	108
Gambar 3.21 Indeks Kemiskinan Lampung	109
Gambar 3.22 Pembangunan Lingkungan Hidup	111

Tabel 1 perincian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	iii
Tabel 2 perincian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	iii
Tabel 3 Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019	vi
Tabel 4 Capaian Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	vii
Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2015-2019	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2019	24
Tabel 2.3 Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2019-2024	27
Tabel 2.4 IKU Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024	32
Tabel 2.5 Perubahan PK Provinsi Lampung Tahun 2019	42
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2019	52
Tabel 3.2 Ringkasan matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2015-2019	53
Tabel 3.3 Capaian Tujuan dan IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 (RPJMD 2015-2019)	54
Tabel 3.4 Ringkasan matrik tujuan, sasaran dan indikator RPJMD 2019-2024	57
Tabel 3.5 Capaian Tujuan dan IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 (RPJMD 2019-2024)	58
Tabel 3.6 Capaian target tujuan per misi berdasarkan pengukuran kinerja Permendagri 86/17	59
Tabel 3.7 Capaian target IKU per Misi berdasarkan Pengukuran Kinerja Permendagri 86/17	60
Tabel 3.8 Capaian Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung dari tahun 2015-2019	70
Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran 1	71
Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran 2.1	73
Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran 2.2	74
Tabel 3.12 Pencapaian Sasaran 3	74
Tabel 3.13 Pencapaian Sasaran 4	75
Tabel 3.14 Pencapaian Sasaran 5	75
Tabel 3.15 Pencapaian Sasaran 6	76
Tabel 3.16 Pencapaian Sasaran 7	76
Tabel 3.17 Pencapaian Sasaran 8.1	77
Tabel 3.18 Pencapaian Sasaran 8.2	78
Tabel 3.19 Pencapaian Sasaran 9.1	79
Tabel 3.20 Pencapaian Sasaran 9.2	79
Tabel 3.21 Pencapaian Sasaran 9.3	80
Tabel 3.22 Pencapaian Sasaran 10	80
Tabel 3.23 Pencapaian Sasaran 11.1	81
Tabel 3.24 Pencapaian Sasaran 11.2	81
Tabel 3.25 Pencapaian Sasaran 12	82
Tabel 3.26 Pencapaian Sasaran 13.1	83
Tabel 3.27 Pencapaian Sasaran 13.2	83

Tabel 3.28 Pencapaian Sasaran 14	84
Tabel 3.29 Pencapaian Sasaran 15	85
Tabel 3.30 Pencapaian Sasaran 16	86
Tabel 3.31 Pencapaian Sasaran 17	87
Tabel 3.32 Capaian Target IKU per Misi RPJMD 2019-2024	88
Tabel 3.33 Pencapaian Sasaran 1.1	89
Tabel 3.34 Pencapaian Sasaran 1.2	90
Tabel 3.35 Pencapaian Sasaran 2	90
Tabel 3.36 Pencapaian Sasaran 3	91
Tabel 3.36 Pencapaian Sasaran 4	92
Tabel 3.37 Pencapaian Sasaran 5.1	93
Tabel 3.38 Pencapaian Sasaran 5.2	94
Tabel 3.39 Pencapaian Sasaran 6	95
Tabel 3.40 Pencapaian Sasaran 7	96
Tabel 3.41 Pencapaian Sasaran 8.1	96
Tabel 3.42 Pencapaian Sasaran 8.2	97
Tabel 3.43 Pencapaian Sasaran 9.1	97
Tabel 3.44 Pencapaian Sasaran 9.2	98
Tabel 3.45 Pencapaian Sasaran 9.3	98
Tabel 3.46 Pencapaian Sasaran 9.4	99
Tabel 3.47 Pencapaian Sasaran 10	99
Tabel 3.48 Pencapaian Sasaran 11	100
Tabel 3.49 Pencapaian Sasaran 12	100
Tabel 3.50 Pencapaian Sasaran 13	101
Tabel 3.51 Pencapaian Sasaran 14	102
Tabel 3.52 Pencapaian Sasaran 15.1	103
Tabel 3.53 Pencapaian Sasaran 15.2	103
Tabel 3.54 Pencapaian Sasaran 15.3	104
Tabel 3.55 Pencapaian Sasaran 15.4	105
Tabel 3.56 Pencapaian Sasaran 16	105
Tabel 3.57 Pencapaian Sasaran 17.1	106
Tabel 3.58 Pencapaian Sasaran 17.2	107
Tabel 3.59 Pencapaian Sasaran 18	108
Tabel 3.60 Pencapaian Sasaran 19	109
Tabel 3.61 Pencapaian Sasaran 20	110
Tabel 3.62 Pencapaian Sasaran 21	110
Tabel 3.63 Pencapaian Sasaran 22	111
Tabel 3.64 Pencapaian Sasaran 23	111
Tabel 3.65 Pagu dan Realisasi Anggaran 2019	112

Tabel 3.66 Perincian Pagu Realisasi Anggaran 2019	113
Tabel 3.67 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem tata kelola pemerintahan berdayaguna, berhasil guna, bersih, transparan dan akuntabel merupakan unsur penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk teknis lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Gambar 1.1 : Sistem Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Gubernur didukung tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.



Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Februari 2020

Dalam proses pencapaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Provinsi Lampung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.



Gambar 1.2 Piramid Sasaran Pembangunan



Sumber: Olahan data Biro Organisasi

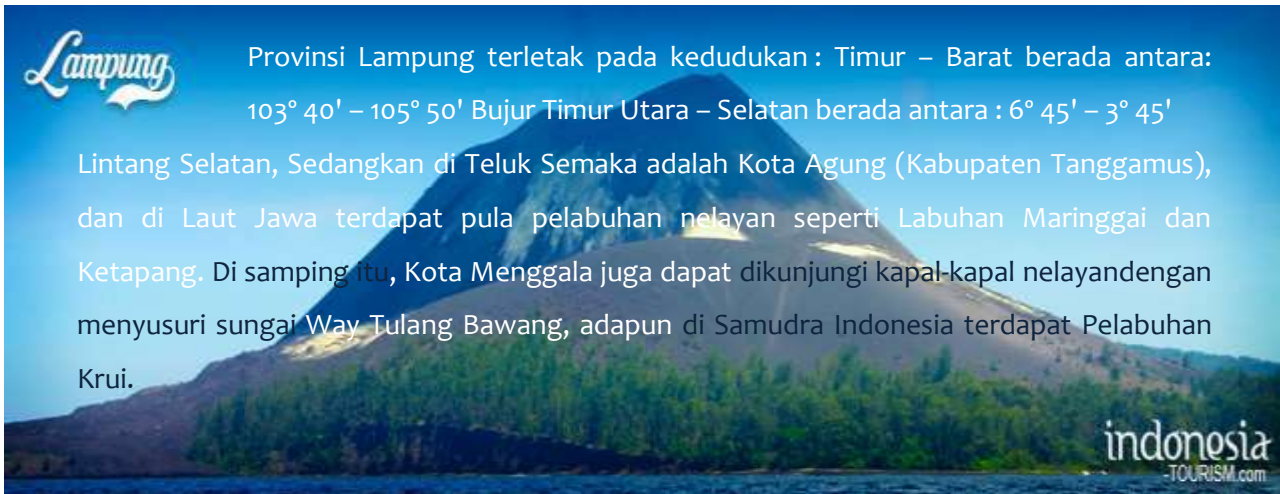
Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Kota, Propinsi dan Nasional.

Sejalan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik serta dukungan beberapa peraturan berlaku seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Pemerintah Provinsi Lampung wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan ditahun 2019.

1.2 Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, beribukota di Bandar Lampung. Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Bandar Udara utama adalah "Radin Inten II", yaitu nama baru dari "Branti", 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan tiga Bandar Udara perintis yaitu: Bandar Udara Mohammad Taufik Kiemas di Krui, Pesisir Barat, Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.





Gambar 1.3 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2020



Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung setelah tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 dengan Ibukota Tanjungkarang-Teluk Betung. Provinsi Lampung memiliki 2 Kota dan 13 Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.4 Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung



Kabupaten Lampung Selatan
Perpu No.3/64 (UU No.14 /64)
Ibukota : Kalianda
Luas : 3.319,04,32 Km²
Kec/Des/Kel : 17/4/256
Jlh. Penduduk : 992.763 Jiwa



Kabupaten Way Kanan
UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999
Ibu Kota : Blambangan Umpu
Luas : 3.921,63Km²
Kec/Des/Kel : 14/6/221
Jlh. PEnduduk : 441.922 Jiwa



Kabupaten Lampung Tengah
Perpu No.3/64 (UU No.14 / 64)
Ibukota : Gunung Sugih
Luas : 3.802,68Km²
Kec/Kel. : 28/314
Jlh. Penduduk : 1.261.498 Jiwa



Kota Metro
UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999
Ibu Kota : Metro
Luas : 61,79 Km²
Kec/Kel : 5/22
Jlh. Penduduk : 162.976 Jiwa



Kabupaten Lampung Utara
Perpu No.3/64 (UU No.14 /64)
Ibukota : Kotabumi
Luas : 2.725.87Km²
Kec/Kel : 23/247
Jlh. Penduduk : 612.100 Jiwa



Kabupaten Pesawaran
UU No.33/2007, 10 Agustus 2007
Ibu Kota : Gedong Tataan
Luas : 2.243,51 Km²
Kec/Kel : 11/144
Jlh. Penduduk : 435.827 Jiwa



Kota Bandar Lampung
UU No.14/64 (PP No.24/83, 17 Juni 83)
Ibukota : Bandar Lampung
Luas : 192,96,00 Km²
Kec/Kel : 20/126
Jlh. Penduduk : 1.015.910 Jiwa



Kabupaten Pringsewu
UU No.48 / 2008, 6 November 2008
Ibu Kota : Pringsewu
Luas : 625,00 Km²
Kec/Des/Kel : 9/5/126
Jlh. Penduduk : 393.901 Jiwa



Kabupaten Lampung Barat
UU No.6 / 1991, 16 Agustus 1991
Ibukota : Liwa
Luas : 4.950,40 Km²
Kec/Des/Kel : 15/5/131
Jlh. Penduduk : 298.286 Jiwa



Kabupaten Mesuji
UU No.49 / 2008, 6 November 2008
Ibu Kota : Mesuji
Luas : 2.184,00 Km²
Kec/Kel : 7/105
Jlh. Penduduk : 198.092 jiwa



Kabupaten Tulang Bawang
UU No.2 / 1997, 3 Januari 1997
Ibu Kota : Menggala
Luas : 3.196,32Km²
Kec/Des/Kel : 15/4/147
Jlh. Penduduk : 440.511 Jiwa



Kabupaten Tulang Bawang Barat
UU No.50 / 2008, 6 November 2008
Ibu Kota : Panaragan
Luas : 1.201,00 Km²
Kec/Des/Kel : 9/3/93
Jlh. Penduduk : 269.162 jiwa



Kabupaten Tanggamus
UU No.2 / 1997, 3 Januari 1997
Ibu Kota : Kota Agung
Luas : 302,64 Km²
Kec/Des/Kel : 20/3/299
Jlh. Penduduk : 586.624 Jiwa



Kabupaten Pesisir Barat
UU No.22 / 2012, 25 Oktober 2012
Ibu Kota : Krui
Luas : 1.201,00 Km²
Kec/Des/Kel : 11/2/116
Jlh. Penduduk : 152.529 Jiwa



Kabupaten Lampung Timur
UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999
Ibu Kota : Sukadana
Luas : 5.325,03 Km²
Kec/Kel : 24/264
Jlh. Penduduk : 1.027.476 Jiwa

Sumber: BPS Lampung Dalam Angka (LDA)



Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki Tugas, Kewenangan dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah

KEPALA DAERAH (KDH)

Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





TUGAS **WAKIL KEPALA DAERAH :**

1. Membantu kepala daerah dalam :
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

KEWAJIBAN Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

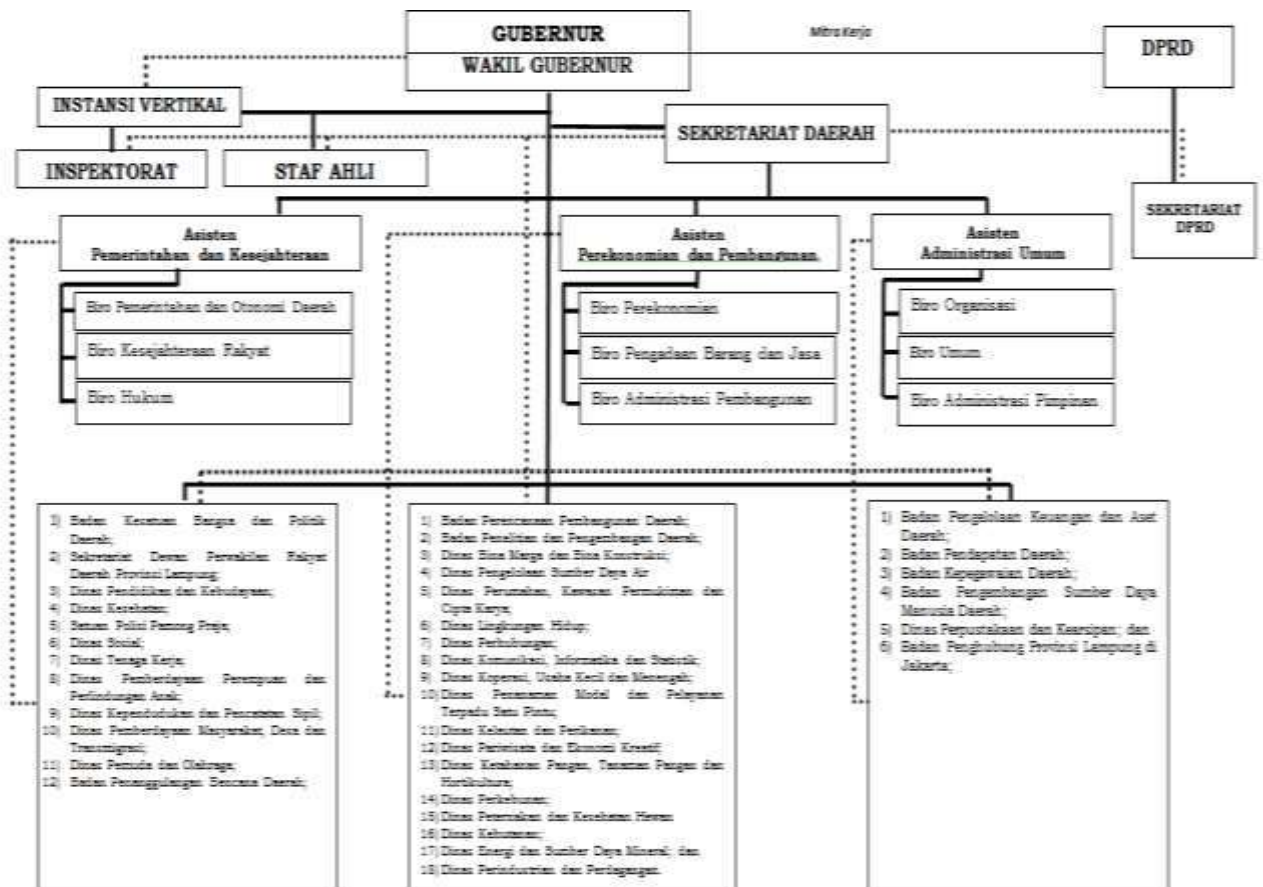
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.



Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2019 mengalami peralihan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Gubernur terpilih menjabat dan memimpin untuk periode 2019-2024. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Terpilih **ARINAL DJUNAJDI** dan Wakil Gubernur **CHUSNUNIA CHALIM** dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas dalam struktur organisasi dan pola hubungan kerja satuan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 dan mulai diimplementasikan tahun 2020, sebagaimana tertuang pada halaman berikut :

Gambar 1.5 Pola Hubungan Kerja Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung



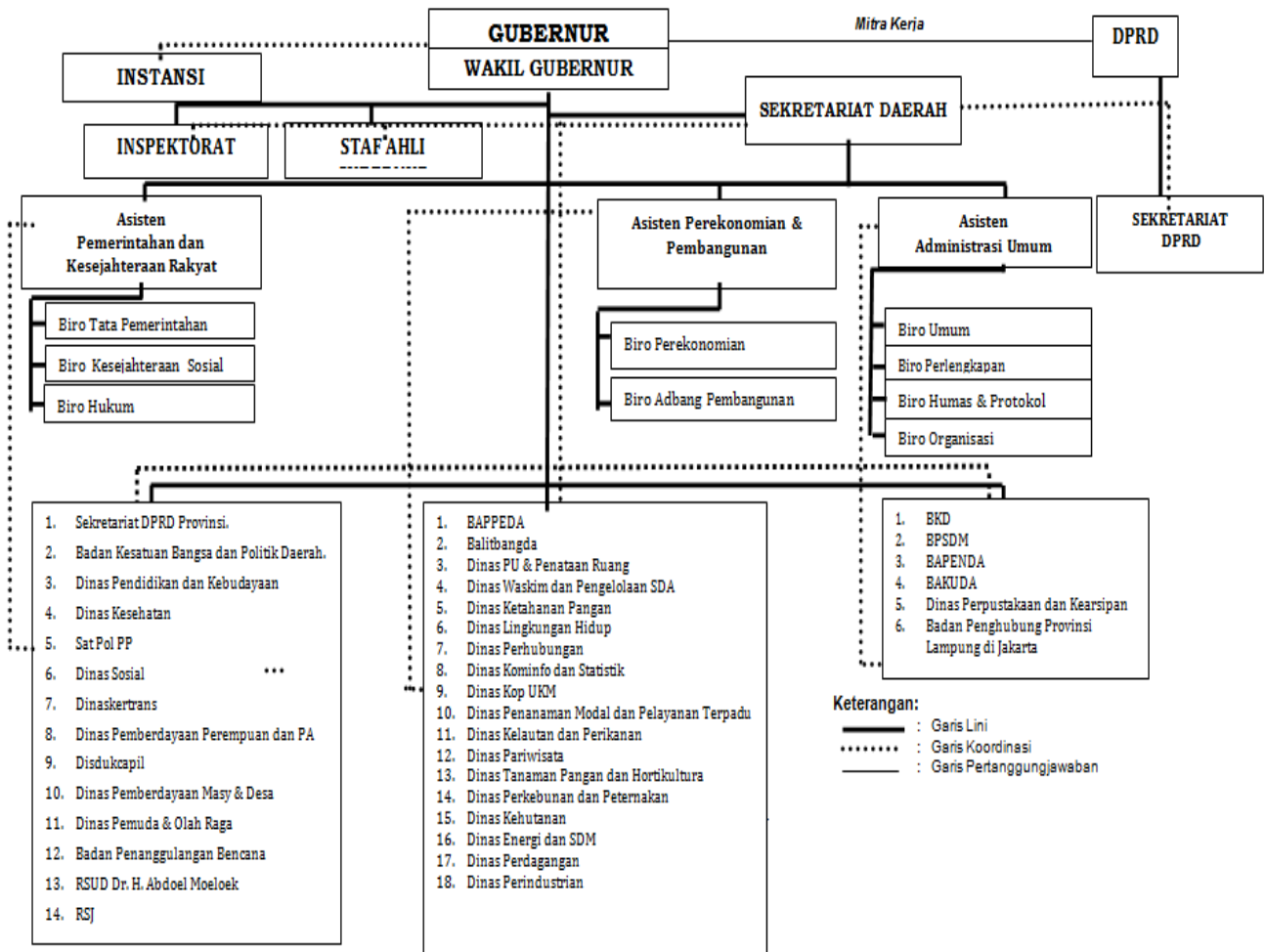
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Januari 2020.



Namun Pemerintah Provinsi Lampung dalam menunjang kinerja di tahun 2019 masih mengacu pada pola hubungan kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana tertuang pada halaman berikut :

Gambar 1.6 Pola Hubungan Kerja satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung

BAGAN 1.1 Struktur Pola Hubungan Kerja Satuan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Pergub 16/2017.



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Januari 2020.



1.3 Isu Strategis

Dalam implementasi pemerintahan suatu daerah, perubahan bukan hanya sebuah pilihan akan tetapi sudah merupakan kebutuhan. Sehingga upaya mempertahankan eksistensinya atau mengembangkan organisasi/sistemnya mengikuti visi serta tujuan dari daerah tersebut dan perlu melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang selalu berubah sesuai perkembangan global. Informasi mendasar mengenai perubahan atau adaptasi yang seharusnya dilakukan tersebut semuanya tersimpan dalam **Isu Strategis** yang tepat.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempertahankan eksistensinya telah menetapkan beberapa isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

1. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor pendukung investasi dan pembangunan sumber daya manusia;
2. Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh 193 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 sasaran dan 242 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2018-2019.



3. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, terdapat beberapa isu sebagai berikut :
 - A. Pilar Sosial, meliputi: Tingginya persentase penduduk miskin, keterlantaran, rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, tingginya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita dan baduta.
 - B. Pilar Ekonomi, meliputi: laju Pertumbuhan PDRB yang stagnan , tingkat Kemantapan Jalan Provinsi belum mencapai target, keberadaan desa tertinggal, ketimpangan antar pendapatan, belum optimalnya pengelolaan Keuangan Daerah.
 - C. Pilar Lingkungan, meliputi: pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dari Kebutuhan Yang Akan Dibangun, terdapatnya Kawasan Kumuh , luas Kawasan Lindung belum sebanding terhadap Luas Lampung, keberadaan kesatuan pengelolaan hutan, keberadaan lahan kritis.
 - D. Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan meliputi: Peran Lembaga dalam kehidupan Demokrasi Masyarakat, Kebebasan Masyarakat Sipil yang terjaga.
4. Pelaksanaan Pemilu serentak yang seharusnya menjadi wahana pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai ajang pemilihan pemimpin berdasarkan program kerja dan visi misi. Namun dengan maraknya politik identitas akhir-akhir ini, menimbulkan berpotensi konflik ditengah masyarakat dan mengaburkan makna pemilu itu sendiri;
5. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain Ketidaksiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keterlibatan dalam pembangunan desa;
6. Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS tahun 2017 berjumlah 8.289.577 jiwa, sebanyak 13,14 persen masih berada dalam kriteria miskin. angka kemiskinan tersebut masih berada diatas rata-rata persentase penduduk miskin secara



nasional. Hal tersebut harus segera diatasi melalui program-program pengentasan kemiskinan yang masif;

7. Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang penduduk Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Memasuki tahun 2014 Lampung memasuki bonus demografi yang ditandai dengan jumlah persentase rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang berada dibawah angka 50%. Keuntungan bonus demografi tersebut adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan; agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran pada usia produktif;
8. Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Sumatera, menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor perhubungan dan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dari sektor perikanan, pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dengan baik untuk peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
10. Pembangunan jalan tol trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan dampak akan menurunnya biaya logistik yang berdampak pada kenaikan volume perdagangan dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk menambah dampak pembangunan tol terhadap peningkatan kesejahteraan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bila disertai pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung yang diarahkan pada kawasan produksi dan pasar serta memperkuat infrastruktur pertanian;
11. Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat ini komoditi ekspor Lampung hanya terpaku pada komoditi batubara, CPO, Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor Lampung rentang



- terhadap fluktuasi. Hal ini harus segera diatasi melalui diversifikasi baik komoditi maupun negara tujuan ekspor;
12. Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan *e-commerce* pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk sutau produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya *e-commerce* berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan;
 13. Sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor: 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penentuan dan penetapan daerah tertinggal ini, terdapat 6 (enam) indikator utama yang dipakai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI sebagai tolak ukur, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta adaptasi mitigasi bencana.
 14. Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang setiap tahun mengalami peningkatan disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, perempuan dan human human trafficking, belum optimalnya penanganan bencana sosial dan penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta masih sering terjadinya konflik sosial dan belum memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara maksimal.
 15. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.
 16. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai,



menjadi kontra produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.

17. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi sehingga mengancam Provinsi Lampung dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah dan lumbung pangan nasional.
18. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum termanfaatkan secara optimal.
19. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau.
20. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, menjadi kontra produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan.

Gambar 1.7 Isu Strategis Refleksi Akhir Tahun 2019



Sumber: Bappeda, Januari 2020.



1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019 – 2024;
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Keputusan Gubernur Nomor: G/476/VI.01/HK/2017 tentang Penyempurnaan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.



1.5 Inovasi Pemrov Lampung

Inovasi/terobosan menjadi kunci dalam reformasi birokrasi, pembangunan daerah serta perbaikan kinerja pelayanan publik.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Langkah awal memberdayakan sumber daya teknologi dalam menyajikan data internal maupun publik adalah dengan melibatkan beberapa aplikasi *online* yang dapat diakses oleh OPD di Lingkungan Provinsi Lampung dan masyarakat/public dalam upaya percepatan reformasi birokrasi. Aplikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Gambar 1.8 e-Samsat Provinsi Lampung

e-Salam (e-Samsat Lampung)

yaitu pembayaran pajak PKB Tahunan melalui ATM Bank-Lampung.

Samsat Link yaitu pembayaran pajak tahunan yang dapat dilakukan diseluruhnya pelayanan samsat.



Gambar 1.9 Aplikasi PKB Bapenda Provinsi Lampung



i-Samsat

aplikasi pengelolaan PKB dan BBNKB yang terintegritas dengan system Regident Kepolisian Daerah (BPKB & ERI).

e-PBBKB yaitu sistem pelaporan PBB-KB secara online.

e-PAP

yaitu sistem pelaporan Pembayaran Pajak Air Permukaan secara online



Gambar 1.10 SAMOLNAS Provinsi Lampung



SAMOLNAS (Samsat Online Nasional) yaitu pembayaran PKB Tahunan yang dapat dilakukan dimana saja bagi 14 POLDA/PEMDA, melalui ATM Bank Nasional dan Bank Daerah yang sudah terhubung dengan SAMOLNAS

Smart Village

Salah satu konsep yang paling sesuai jaman sekarang ini yaitu bagaimana suatu desa dapat menyelesaikan berbagai permasalahannya dengan cerdas dan mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi nilai tambah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Konsep diharapkan mampu melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan desa, Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa dengan lebih efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna dengan memanfaatkan informasi dan teknologi. Terwujudnya Smart Village yang optimal dipersiapkan dengan fokus berikut:

Smart Institution, Smart Infrastructure, Smart Service Delivery, Smart Technology and Innovation, Smart Societi.

Gambar 1.8 konsep smart village

Sumber: Dinas PMD, Januari 2020.



1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2018 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis 2015-2019 dan Perencanaan 2019-2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Periode Renstra Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Rencana Strategis.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2019 mengalami peralihan masa jabatan Gubernur terpilih. Dengan dilantiknnya kepala daerah terpilih pada awal Juni 2019 dengan periode masa jabatan 2019-2024 maka visi dan misi Provinsi Lampung mengalami perubahan sesuai dengan janji kerja Gubernur terpilih. Sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, memiliki 2 (dua) target pembanding sesuai dengan perjanjian kinerja pada masanya. Namun pada dasarnya penyusunan LAKIP Provinsi Lampung tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis



RPJMD Provinsi Lampung Tahun merupakan hasil dari proses penyusunan mulai dari rancangan teknokratik, rancangan awal, integrasi dengan visi misi Gubernur terpilih, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Lampung dan konsultasi publik, hingga menjadi rancangan akhir. RPJMD Provinsi Lampung Tahun menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perda Provinsi Lampung tentang RPJMD Provinsi Lampung yang berisikan Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; Penutup, serta Lampiran-Lampiran. RPJMD Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sehubungan tahun 2019 merupakan tahun peralihan masa jabatan maka terdapat 2 RPJMD yang berjalan pada tahun ini. RPJMD dengan periode 2015-2019 dan 2019-2024. Oleh sebab itu perencanaan dalam bab ini akan menjelaskan kedua perencanaan yang dimaksud.



A. RPJMD 2015-2019

RPJMD 2015-2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa RPJMD Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

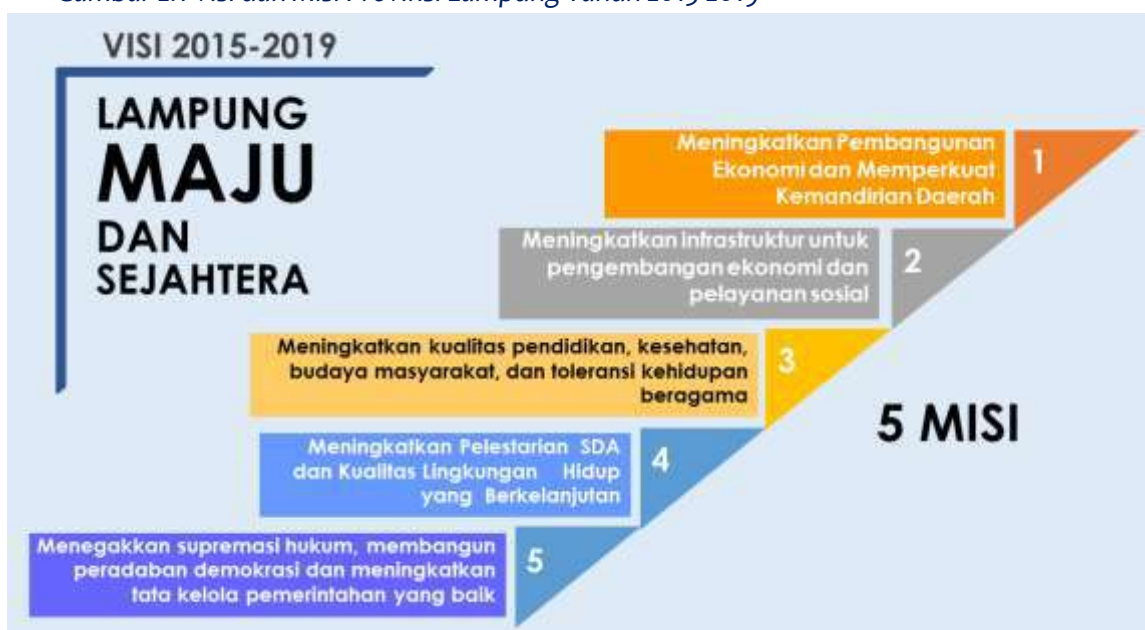
1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Provinsi Lampung. Visi mengandung makna bahwa Provinsi Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Provinsi Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah :

"LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019"

Misi Provinsi Lampung 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019



Sumber: BAPPEDA, Januari 2020.



2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan merupakan arahan yang bersifat makro yang menegaskan target-target yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah dalam mendukung misi atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui penyempurnaan IKU dan telah ditetapkan pada Keputusan Gubernur Nomor: G/476/VI.01/HK/2017 tentang Penyempurnaan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Keputusan yang dimaksud maka dijelaskan pada lampiran keputusan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) tujuan; 16 (enam belas) indikator tujuan; 17 (tujuh belas) sasaran strategis; 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU). Maka Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dasar Pemerintah Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berdasarkan Keputusan Gubernur yang dimaksud maka untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:



Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2015-2019

Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah

TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DAERAH						
URAIAN	INDIKATOR (SATUAN)	TARGET 2019		URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER	TARGET	
			2018						2019	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah.	1. Pertumbuhan ekonomi	5.6	1. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian, perternakan, kehutanan, dan perikanan (%)	Persen	$\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB Sektor a tahun } n}{\text{PDRB Sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Sektor a = Sektor pertanian, perternakan, kehutanan, dan perikanan Tahun n = Tahun pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum pengamatan	DATA BPS	4.42	4.48	
	2. Indeks Gini (koefisien)	0.36		2. Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan (%)	Persen	$\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB Sektor a tahun } n}{\text{PDRB Sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Sektor a = Sektor Industri Pengolahan Tahun n = Tahun pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum pengamatan	DATA BPS	7.46	7.46	
	3. Angka kemiskinan	12.36		3. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	$\frac{\text{Volume Usaha Koperasi } n - \text{Volume Usaha Koperasi } n+1}{\text{Volume usaha koperasi } n+1} \times 100\%$	ODS (Online Data System Kementerian Koperasi dan UKM)	-	4.5	
				3. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung	4. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	Persen	$\frac{\text{PDRB Sub Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB Sub Sektor a tahun } n}{\text{PDRB Sub Sektor a tahun } n} \times 100\%$ dimana : Sub Sektor a = Sub Sektor Industri Pengolahan Tahun n = Tahun pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum pengamatan	DATA BPS	4.76	5.24
				4. Meningkatnya Kompetensi & produktivitas kerja	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja}} \times 100\%$	DATA BPS	4.45	4.17
				5. Peningkatan penanaman modal (investasi) daerah	6. Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga konstan	Persen	$\frac{\text{Nilai Investasi PMTDB tahun } n+1 - \text{Nilai Investasi PMTDB tahun } n}{\text{Nilai Investasi PMTDB tahun } n} \times 100\%$ dimana : Tahun n = Tahun pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum pengamatan	DATA BPS	13.24	14.56
				6. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata pada perekonomian daerah	7. Rata-rata pengeluaran wisatawan	Juta	Hasil Survey terhadap wisatawan	DINAS PARIWISATA	1.20	1.375
				7. Peningkatan PAD	8. Laju pertumbuhan PAD	Persen	$\frac{\text{Jumlah PAD tahun } n+1 - \text{Jumlah PAD tahun } n}{\text{Jumlah PAD tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Tahun n = Tahun pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum pengamatan	BAPENDA	3.26	3.28

TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DAERAH						
URAIAN	INDIKATOR (SATUAN)	TARGET 2019		URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER	TARGET	
								2018	2019	
Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah.	4. Kondisi kemantapan jalan provinsi (%)	85	8. Tersedianya Infrastruktur/prasarana dan sarana yang handal	9. Kondisi kemantapan jalan provinsi (%)	Persen	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan total yang menjadi kewenangan provinsi}} \times 100\%$	DINAS PUPR	80.00	85.00	
	5. Tingkat Penyediaan Infrastruktur irigasi pertanian (%)	100		10. Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian (%)	Persen	$\frac{\text{Panjang infrastruktur irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Infrastruktur irigasi yang diperlukan}} \times 100\%$	DINAS PENGAIRAN	100	100	
	6. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%)	100	9. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan air bersih, air limbah, listrik)	11. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%)	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga Berakses terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PSDA	90.11	100	
	7. Tingkat kawasan permukiman kumuh (%)	0		12. Tingkat kawasan permukiman kumuh (%)	Persen	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100\%$	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PSDA	0.53	0	
	8. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)	100		13. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses terhadap lingkungan pemukiman sehat}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PSDA	79.82	100	
	9. Rasio elektrifikasi rumah tangga	83.47	10. Meningkatnya rumah tangga yang berlistrik	14. Rasio elektrifikasi rumah tangga	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$	DINAS ESDM	81.04	83.47	
	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.	10. Angka rata-rata lama sekolah	7.7	11. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun	15. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	DATA BPS	7.65	7.7
					16. Angka harapan lama sekolah	Tahun	Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t sama dengan faktor koreksi pesantren kali jumlah penduduk usia 1 pada tahun t dibagi jumlah penduduk usia 1 pada tahun t	DATA BPS	12.55	12.7

TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DAERAH					
URAIAN	INDIKATOR (SATUAN)	TARGET 2019		URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER	TARGET
			2018						2019
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	11. Angkat Harapan Hidup	72	12. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	17. Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DATA BPS	71	72
Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	12. Predikat Anugrah Parahita Ekapraya	Utama	13. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	18. Predikat Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat	Penilaian Anugra Parahita Ekapraya terkait pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PP-PA) oleh kemen PPPA	KEMEN PPPA	Utama	Utama
				19. Provinsi layak anak (kabupaten)	Kabupaten/kota	Jumlah kabupaten layak anak	DINAS PP DAN PA	3	5
Mewujudkan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan dan Keagamaan yang Toleran	13. Peringkat penyelesaian konflik sosial tingkat nasional	Terbaik	14. Meningkatnya kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran	20. Peringkat penyelesaian konflik sosial tingkat nasional	Peringkat	Penilaian penyelesaian konflik sosial yang dikeluarkan oleh Kemendagri	KEMENDAGRI	Terbaik Nasional	Terbaik Nasional
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	14. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62	15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	21. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	$IKA + IKU + IKTL$ 3 Dimana : IKA - Indeks Kualitas Air IKU - Indeks Kualitas Udara IKTL - Indeks Kualitas Tutupan Lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN DINAS KEHUTANAN	59.4	62
Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif	15. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	16. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kriteria AKIP	Penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan RB terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	KEMENPAN DAN RB	BB	BB
	16. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	17. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	23. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria Opini	Penilaian Opini yang dikeluarkan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	BPK	WTP	WTP

Sumber: Kepgub No G/476/M.01/HK/2017



3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, Keputusan Gubernur Nomor G/476/VI.01/HK/2017 tentang Penyempurnaan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Provinsi Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
Misi kesatu: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah			
1.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (%)	4.48
2.	Peningkatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, UMKM dan Koperasi terhadap PDRB Provinsi Lampung	2. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	7.46
		3. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	
3.	Peningkatan pertumbuhan sub sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung	4. Laju pertumbuhan sub sektor perdagangan (%)	5.24
4.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas kerja	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	4.17
5.	Peningkatan penanaman modal (investasi) daerah	6. Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga konstan	14.56
6.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata pada perekonomian daerah	7. Rata-rata pengeluaran wisatawan	1,375
Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial			
7.	Peningkatan PAD	8. Laju pertumbuhan PAD	3.28
8.	Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana yang handal	9. Kondisi kemantapan jalan provinsi (%)	85
		10. Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian	100
9.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah, listrik)	11. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	100
		12. Tingkat kawasan permukiman kumuh	0
		13. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)	100
10.	Meningkatnya rumah tangga yang berlistrik	14. Rasio elektrifikasi rumah tangga	83.47

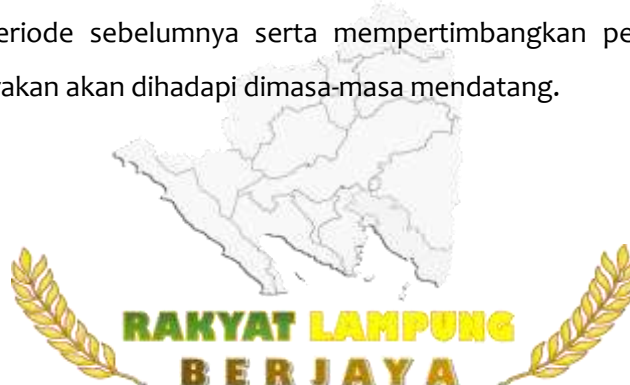


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018
Misi Ketiga Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan Beragama yang Toleran			
11.	Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun	15. Angka rata - rata lama sekolah.	7.7
		16. Angka harapan lama sekolah	12.7
12.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	17. Angka Harapan Hidup	72
13.	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	18. Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Utama
		19. Provinsi Layak Anak (Kabupaten)	5
14.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan dan Keagamaan yang Toleran.	20. Peringkat penyelesaian konflik sosial tingkat nasional.	Terbaik Nasional
Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	21. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62
Misi Kelima: Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Loka dan Memantapkan Pemerintahan yang Baik dan Antisipatif			
16.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB
17.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	23. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2019

B. RPJMD 2019-2024

RPJMD 2019-2024 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan tahap ke-4 (tahap akhir) pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera di berbagai bidang pembangunan. Untuk menjaga momentum tersebut, banyak hal yang sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya (RPJMD 2005-2009, RPJMD 2010-2014, dan RPJMD 2015-2019) serta perlu disempurnakan sejalan dengan kemajuan yang ingin diraih. Kondisi ini tentu saja membutuhkan pembaruan dan penyegaran metode dalam rangka menjaga semangat dan momentum pembangunan pada jangka panjang berikutnya. Oleh karenanya, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan dihadapi dimasa-masa mendatang.



VISI

1. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stake holders* dan terkristalisasi sebagai jati diri.

Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Dengan mendasarkan kepada : modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025; maka Visi Provinsi Lampung 2005-2025 yaitu:

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

(Aman, Berbudaya, maju dan Berdayasaing, Sejahtera)

Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005- 2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut:

Gambar 2.2 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



2. Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2019-2024

Dalam RPJMD 2019-2024 dijelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) tujuan dengan 13 (tiga belas) Indikator Tujuan; 23 (dua puluh tiga) Sasaran dengan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Sasaran/IKU Pemerintah Provinsi Lampung. Penjabaran dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2019-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)	
					2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024			
Rakyat Lampung Berjaya														
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai														
1.	Terwujudnya Masyarakat Yang Berbudaya Luhur dan Kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	73	1.1.1 Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA	68	69	70	71	72	73	73	
					Tingkat kasus kriminalitas terselesaikan	68,88	72,20	78,85	82,18	85,50	88,83	92,15	92,15	
				1.1.2 Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	72,01	68,67	72	73	74	75	76	76	
2.	Pelestarian Warisan Budaya	2.1 Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	2.1.1 Meningkatnya pelestarian Budaya	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	18	33	60	70	80	90	100	100	
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Dan Pemerataan Untuk Pelayanan Meningkatkan Publik														
Kualitas														
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	3.1 Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	A	3.1.1 Meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	C	CC	B	B	BB	BB	A	A	
				3.1.2 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
					Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	A	A	A	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)		
					2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024				
Rakyat Lampung Berjaya															
			3.1.3	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A		
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas															
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	4.1 Indeks Pembangunan Manusia	72,72	4.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,95	70,23	72,1	72,19	72,29	72,39	72,48	72,48	
				4.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,46	12,48	12,64	12,71	12,78	12,85	12,92	12,92	
						Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,75	7,8	7,8	7,9	8	8,1	8,2	8,2	
				4.1.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	90.49	90,57	91,03	91,26	91,49	91,72	91,95	91,95	
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	66.00	63,82	64,24	64,45	64,66	64,87	65,08	65,08	
						Jumlah Kab/Kota Layak Anak	0	3	6	9	13	14	15	15	
						Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	0.59	1.60	2.18	2.6	3.12	3.74	4.49	4.49	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)			
					2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024					
Rakyat Lampung Berjaya																
			4.1.5	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	4 (POPWIL)	6 (POPNAS)	4 (POPWIL)	6 (POPNAS)	3 (POPWIL)	5 (POPNAS)	3(POPWIL)	3 (POPWIL)			
	4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,1	4.2.1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	NA	4,06	3,85	3,26	3,66	3,57	3,48	3,48			
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah																
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	5.1	Capaian rata-rata peningkatan kondisi Infrastruktur (indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi)	91	5.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	NA	6,01	6,2	6,33	6,46	6,6	6,67	6,67	
					5.1.2	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	84,15	92,13	94	95	96	97	98	98	
					5.1.3	Meningkatnya kapasitas Jaringan Sumberdaya Air	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	30	30	37	40	45	50	55	55	



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)	
					2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024			
Rakyat Lampung Berjaya														
	5.2 Capaian rata-rata peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%)	83,65	5.2.1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman	69,23	71,19	72,90	74,63	76,44	78,36	80,34	80,34		
				Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	65,35	64,63	69,31	71,37	73,53	75,99	78,68	78,68		
				Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	0,67	0,55	0,49	0,46	0,43	0,40	0,37	0,37		
				Persentase Rumah tidak Layak huni	5,9	5,02	3,98	3,25	2,52	1,78	1,03	1,03		
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan														
6.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	6.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,8-6,1	6.1.1 Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,83	1,33	1,63	2,3	2,92	3,09	3,19	3,19	
				6.1.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	6,18	9,08	6,23	6,26	6,28	6,29	6,33	6,33	
					Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6,57	6,87	7,26	8,2	9,08	9,87	10,73	10,73	
		6.2 Laju Inflasi	3,0-3,5	6.2.1 Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	3,02	2,73	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	
		6.3 Angka Kemiskinan	9,18	6.3.1 Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,69	13,01	11,1	10,62	10,14	9,66	9,18	9,18	
		6.4 Indeks Williamson	0,19	6.4.1 Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	KET (FORMULA)			
					2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024					
Rakyat Lampung Berjaya																
	6.5	Indeks Gini	0,3	6.5.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	PDRB perkapita (Juta)	37,21	39,86	45,54	48,2	50,8	53,41	56	56		
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama																
7.	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.	7.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,32	7.1.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,02	56,62	59,63	61,15	61,92	62,57	63,32	63,32	
					7.1.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	148.3	145.1	144.7	144,3	143,9	143,5	143,1	143,1	



IKU PJMD 2019-2024 dan formulasinya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024. IKU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 IKU Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024

TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	73	1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	Hasil laporan Tahunan Kementerian Agama	Kanwil Kementerian Agama/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	68,5	69	70	71	72	73
				2. Tingkat Kriminalitas	Angka	$\frac{\sum \text{Kasus kriminalitas yang terselesaikan}}{\sum \text{Keseluruhan kasus}} \times 100$	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	75,6	78,85	82,18	85,50	88,83	92,15



TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
			2. Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	$\text{Indeks } (X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})}$ <p>dimana :</p> <p>X_{ijk} : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke i, variabel ke j, indikator ke k.</p> <p>X_{ideal} : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator xijk</p> <p>X_{terburuk} : tingkat capaian terburuk dari indikator xijk</p> <p>Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks } (x_{ijk}) \leq 1$: untuk memudahkan dimana :</p> <p>IDI = Indeks Demokrasi Indonesia</p> <p>P = Nilai penimbang dari aspek ke 1</p> <p>I (A) = Indeks aspek ke 1</p> <p>i = 1 = aspek kebebasan sipil, 2 = aspek hak-hak politik, 3 = aspek lembaga demokrasi.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	70	72	73	74	75	76
2. Pelestarian Warisan Budaya	2. Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	100	3. Meningkatnya Pelestarian Budaya	4. Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	Angka	Hasil penetapan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an Provinsi Lampung	45	60	70	80	90	100



TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target						
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik	3. Nilai Reformasi Birokrasi	A	4. Meningkatkan kualitas Implementasi reformasi birokrasi	5. Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	CC	B	B	BB	BB	A
				5. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	6. Opini BPK/WTP	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					7. Nilai SAKIP		Hasil evaluasi Kemenpan. RB	Kemenpan. RB	B	BB	BB	A	A	A
				6. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	8. Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ Bobot Nilai	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	C	B	B	B	B	A
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	4. Indeks Pembangunan Manusia	72,72	7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	9. Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	72	72,10	72,19	72,29	72,39	72,48



TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
			8. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	10. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan lama sekolah pada umur a ditahun t sama dengan faktor koreksi persentase kali jumlah Penduduk usia 1 pada tahun1 dibagi jumlah penduduk usia 1 pada tahun 1	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	12,55	12,64	12,71	12,78	12,85	12,92
				11. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	7,7	7,8	7,9	8	8,1	8,2
			9. Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	$IPG = \frac{IPM \text{ Laki-laki} \times 100}{IPM \text{ Perempuan}}$	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	90,80	91,03	91,26	91,49	91,72	91,95
				13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	IDG = rata-rata aritmatik dari 3 indeks a. Keterlibatan perempuan dalam parlemen b. Perempuan sebagai tenaga profesional c. Sumbangan pendapatan perempuan	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	64,03	64,24	64,45	64,66	64,87	65,08



TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
				14. Jumlah Kab/Kota Layak Anak	Angka	Jumlah Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	5	6	9	13	14	15
				15. Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	Persen	$\frac{\sum \text{Penyandang Disabilitas yang mandiri}}{\sum \text{penyandang Disabilitas yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial Provinsi Lampung	1,86	2,18	2,60	3,12	3,74	4,49
			10. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	16. Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	Peringkat	Hasil Peringkat oleh Kemenpora	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	4 (POPWL)	4	6	3	5	3



TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,1	11. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angk. Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia angkatan kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	4,17	3,85	3,26	3,66	3,57	3,48
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Prasaran, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	6. Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur (Indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi)	91	12. Meningkatkan konektivitas antar wilayah	18. Indeks Konektivitas	Indeks	$\frac{\sum e}{v}$ <p>Dimana :</p> $e = \sum \text{Indeks konektivitas}$ $v = \sum \text{Jaringan jalan}$	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Provinsi Lampung	6,1	6,2	6,33	6,46	6,6	6,67
			13. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	19. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	93	94	95	96	97	98
			14. Meningkatkan kapasitas Jaringan Sumber daya Air	20. Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP>2	Persen	$\frac{\text{Luas sawah Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dengan panen} > 2 \times \text{setahun (Ha)}}{\text{Luas sawah Daerah Irigasi kewenangan Provinsi (Ha)}} \times 100\%$	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	33	37	40	45	50	55



TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7. Capaian rata-rata Peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%)	83,65	15. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman	21. Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman	Persen	$\frac{\text{Jml R.T. berakses terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung	71,50	72,90	74,63	76,44	78,36	80,34
				22. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	Persen	$\frac{\text{Jml Rumah Tangga berakses Sanitasi}}{\text{Rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung	66,41	69,31	71,37	73,53	75,99	78,68
				23. Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Persen	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung	0,52	0,49	0,46	0,43	0,40	0,37
				24. Persentase Rumah tidak Layak huni	Persen	$\frac{\sum \text{RTLH yang tertangani kurun waktu tertentu}}{\sum \text{Rumah disuatu wil tertentu}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung	4,50	3,98	3,25	2,52	1,78	1,03



TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
6. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis Pertanian	8. Pertumbuhan Ekonomi	5,7-6,0	16. Meningkatkan pertumbuhan Sektor Pertanian	25. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	$\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB sektor a tahun } n}{\text{PDRB sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana :	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	0,93	1,63	2,30	2,92	3,09	3,19
			17. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	26. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	$\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB sektor a tahun } n}{\text{PDRB sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Sektor a = sektor Industri Pengolahan	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	7,46	6,23	6,26	6,28	6,29	6,33
				27. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	$\frac{\text{PDRB Sektor a tahun } n+1 - \text{PDRB sektor a tahun } n}{\text{PDRB sektor a tahun } n} \times 100\%$ Dimana : Sektor a = sektor Industri Perdagangan	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	5,24	7,26	8,20	9,08	9,87	10,73
	9. Laju Inflasi	3,0-3,5	18. Menjaga stabilitas harga	28. Laju Inflasi	Inflasi	$\left[\frac{(1+\Delta \text{Inf}_1)(1+\Delta \text{Inf}_2) \dots (1+\Delta \text{Inf}_T)}{\text{Inf}(n)} \right] - 1$ $\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Perub. Inflasi dr nilai th sbelumnya}}{\text{Inf}(n)} \times 100\%$ Dimana :	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	3,0	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5



TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
	10. Angka Kemiskinan	9,18	19. Menurunnya Kemiskinan	29. Angka Kemiskinan	Persen	$Z = \frac{Y_i - \bar{Y}}{\frac{\sum(Y_i - \bar{Y})}{N}}$ $Z = 0$ Z = Garis Kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	12,0	11,10	10,62	10,14	9,66	9,18
	11. Indeks Williamson	0,19	20. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	30. Indeks Williamson	Indeks	$IW = \frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}{N \cdot \bar{Y}^2}$ Yi = PDRB perkapita di Kab./Kota i Y = PDRB Perkapita rata-rata Prov. Fi = \sum penduduk di Kab./Kota i	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19
	12. Indeks Gini	0,3	21. Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	31. PDRB perkapita (Juta)	Indeks	$\frac{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}{N \cdot \bar{Y}^2}$ PDRB Penduduk Pertengahan Tahun	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	42,94	45,54	48,20	50,80	53,41	56,00
7. Mewujudkan Keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan pembangunan	13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,32	22. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	32. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	$IKA + IKU + IKTL$ Dimana : IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indek Kualitas Udara IKTL = Indek Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	57,13	59,63	61,15	61,92	62,57	63,32

TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA	Target					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2019	2020	2021	2022	2023	2024
			23. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana	33. Indeks Resiko Bencana	Indeks	$R = H \times V/C$ dimana : R = Risiko Bencana H = Ancaman (<i>Hazard</i>), adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau harta benda. V = Kerentanan (<i>Vulnerability</i>), adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (<i>disaster</i>) atau tidak C = Kapasitas (<i>Capacity</i>) adalah kapasitas yang tersedia untuk pemulihan kembali setelah terjadi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	144,9	144,7	144,3	143,9	143,5	143,1



3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Perubahan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan prioritas yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019.

Sesuai pernyataan peraturan tersebut di atas, dan sehubungan telah terjadi ketiga kondisi dimaksud yaitu terjadi pergantian pejabat dalam hal ini gubernur maka tentunya merubah arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diarahkan pada terwujudnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, termasuk didalamnya adalah perwujudan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih pada saat masa kampanye lalu. Hal ini tentu saja merevisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur.

Perubahan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung berikut:

Tabel 2.5 PK Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai			
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,5
		2. Tingkat pertumbuhan kriminalitas	75,53
2.	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	70
3.	Meningkatnya pelestarian budaya	4. Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh kementerian	45
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik			
4.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	5. Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	CC
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	6. Opini BPK/WTP (Opini)	WTP
		7. Nilai SAKIP	B
6.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	CC



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas			
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	9. Angka Harapan Hidup (Tahun)	72
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	10. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,55
		11. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,7
9.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	90,80
		13. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	64,03
		14. Jumlah Kab/Kota Layak Anak	5
		15. Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	1,86
10.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi dibidang olah raga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	16. Peringkat pada event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	4 (POPWIL)
11.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,17
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah			
12.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	18. Indeks Konektivitas	6,1
13.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	19. Rasio elektrifikasi rumah tangga	93
14.	Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air	20. Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2	33
15.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman	21. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman	71,5
		22. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	66,41
		23. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0,52
		24. Persentase rumah tidak layak huni	4,50
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
16.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	25. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	0,93
17.	meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	26. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7,46
		27. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,24
18.	Menjaga stabilitas harga	28. Laju Inflasi	3,0
19.	Menurunnya kemiskinan	29. Angka kemiskinan	12,0
20.	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	30. Indeks Williamson	0,21
21.	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	31. PDRB perkapita (juta)	42,94
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
22.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	32. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,13
23.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	33. Indek Resiko Bencana	144,9



4. JANJI KERJA GUBERNUR “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Gubernur Lampung memiliki 33 (tiga puluh tiga) janji kerja dalam 100 hari kerja yang menjadi prioritas kinerja, janji kerja yang dimaksud antara lain:

1. Kartu Petani Berjaya (KPB). Memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan:
 - a. Kepastian mendapatkan benih/bibit, pupuk, pestisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani.
 - b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani.
 - c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.
 - d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi.
 - e. Jaminan sosial bagi petani lansia.
2. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
3. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu.
4. Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan.
5. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri.



6. Program Nelayan Berjaya: Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:
 - a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
 - b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
 - c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia.
 - d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
 - e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan.
7. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategis bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Pemerintahan Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar.
8. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan:
 - a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung.
 - b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia.
 - c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata.
 - d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui).
9. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
10. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional.



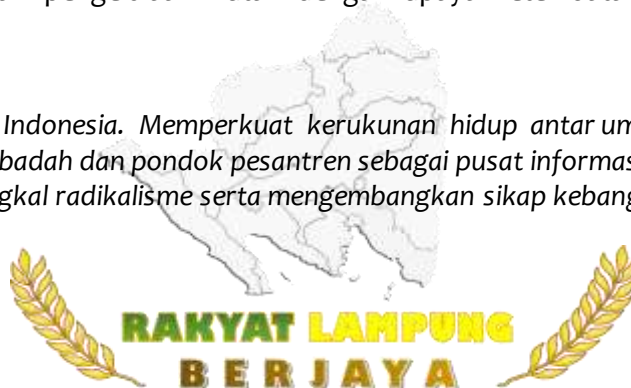
11. **Infrastruktur Lampung Berjaya.**
 - a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antar Kabupaten/Kota.
 - b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
 - c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 - d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

12. **Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur.** Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat:
 - a. Berbasis peran serta warga dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur.
 - b. Memperkuat sumber daya manusia dan sumber daya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap, dan tepat.
 - c. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong.

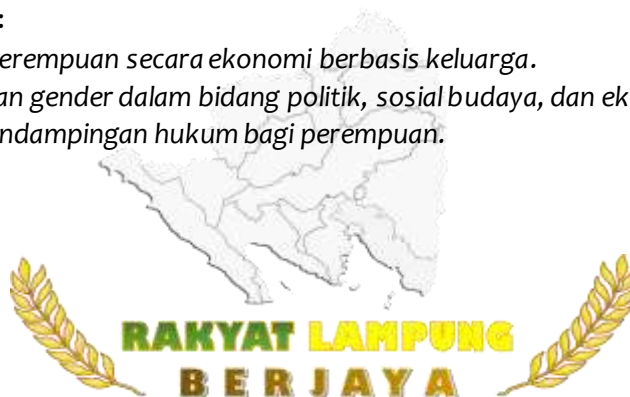
13. **Lampung Terang Berjaya.** Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus pada
 - a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik.
 - b. Mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air, dan gas bumi.
 - c. Kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian.

14. **Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat:**
 - a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan.
 - b. Mengorientasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat.
 - c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan.

15. *Lampung Merawat Indonesia.* Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.



16. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Mesjid dan Rumah ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Mesjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
17. *Lampung Mengaji*. Memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al Qur'an dengan memberikan bantuan fasilitas khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pondok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an Lampung.
18. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan:
 - a. Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis startup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMA dan SMK.
 - c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya.
19. Revitalisasi SMK. Mengintegrasikan SMK ke dunia kerja dengan:
 - a. Memperluas kerja magang sebagai bagian kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha.
 - b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri.
 - c. Memfasilitasi kemitraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi.
20. Lampung Menuju Bebas Narkoba.
 - a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama.
 - b. Memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan.
 - c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi.
21. Perempuan Berjaya:
 - a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga.
 - b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi.
 - c. Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.



22. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
23. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui:
 - a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal.
 - b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usaha dan pemasaran.
 - c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan.
 - d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota).
24. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan
 - a. Menyederhanakan perizinan.
 - b. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha.
 - c. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan.
 - d. Memfasilitasi sinergi di antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi.
25. Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan Kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.
26. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota), dengan:
 - a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak.
 - b. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak.
 - c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.
 - d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta, dan ruang publik.
 - e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak.
 - f. Memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu.

27. Anak Muda Berjaya:

- a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antar kalangan muda berbasis komunitas.
- b. Menggalakkan “Gerakan Malu Menganggur” di kalangan muda.
- c. Mencetak wirausaha muda.
- d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak Muda di Kabupaten/Kota.

28. Lampung Sehat:

- a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas.
- b. Memperkuat peran Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit

29. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada:

- a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi.
- c. Memperbaiki tata kelola organisasi olah raga melalui penempatan personal yang berkompeten.

30. Smart Village.

- a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa.
- b. Memfasilitasi digitalisasi administrasi desa.
- c. e-participation: melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan/atau aplikasi.

31. Pendampingan program pembangunan desa.

- a. Memberikan fasilitas pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa.
- b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.



32. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan:
- Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi.
 - Menciptakan sistem penjurangan karier melalui fit and proper test berbasis kompetensi.
 - Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/Kota) dan asas keadilan.
 - Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja.
 - Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset-aset Pemerintah Provinsi.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha.
 - Membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
33. APBD Rakyat Berjaya:
- Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik.
 - Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengertian akuntabilitas pada dasarnya memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2019.








3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kategori/Interpretasi	Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$90 \leq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	

Sumber: Permendagri 96/2017

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Lampung.



A. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DAN IKU RPJMD 2015-2019

Gambaran penilaian tingkat pencapaian target tujuan dari masing-masing kelompok indikator kinerja tujuan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2019, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor G/476/VI.01/HK/2017 tentang Penyempurnaan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 telah ditetapkan 8 tujuan dengan 16 indikator dan 17 sasaran dengan 23 indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Ringkasan Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2015-2019

Tujuan	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR
Tujuan 1	3 Indikator	Sasaran 1	1 indikator
		Sasaran 2	2 indikator
		Sasaran 3	1 indikator
		Sasaran 4	1 indikator
		Sasaran 5	1 indikator
		Sasaran 6	1 indikator
		Sasaran 7	1 indikator
Tujuan 2	6 indikator	Sasaran 8	2 indikator
		Sasaran 9	3 indikator
		Sasaran 10	1 indikator
Tujuan 3	1 indikator	Sasaran 11	2 indikator
Tujuan 4	1 indikator	Sasaran 12	1 indikator
Tujuan 5	1 indikator	Sasaran 13	2 indikator
Tujuan 6	1 indikator	Sasaran 14	1 indikator
Tujuan 7	1 indikator	Sasaran 15	1 indikator
Tujuan 8	2 indikator	Sasaran 16	1 indikator
		Sasaran 17	1 indikator

Sumber: Olahan data berdasarkan Kepgub No G/476/VI.01/HK/2017



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Provinsi Lampung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Tujuan dan IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 (RPJMD 2015-2019)

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tujuan	Realisasi	Capaian	Ket.	No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2018			Kinerja 2019		
										Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	5,27	94,11	Publikasi BPS	1	Laju pertumbuhan sektor pertanian, perternakan, kehutanan, dan perikanan	%	4,42	4,01	90,72%	4,48	4,07	90,85
2	Indeks Gini (koefisien)	koefisien	0,36	0,331	108,76	-	2	Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	%	7,46	9,08	121,71%	7,46	10,1	135,39
3	Angka Kemiskinan	%	12,36	12,62	98,10	-	3	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	-	-	-	4,5	7,8	173,33
							4	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,76	6,87	144,33%	5,24	9	171,76
							5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,45	4,06	109,60%	4,17	4,03	103,47
							6	Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga konstan	%	13,24	9,04	68,24%	14,56	4,62	31,73
							7	Rata-rata pengeluaran wisatawan	Juta	1,20	1,22	101,42%	1375	1.368	99,49
							8	Laju pertumbuhan PAD	%	3,26	5,16	158,28%	3,28	4,38	133,54
4	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	%	85	77,23	90,86	-	9	Kondisi kemantapan jalan provinsi	%	80,00	77,23	96,59%	85	77,23	90,86



No.	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tujuan	Realisasi	Capaian	Ket.	No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2018			Kinerja 2019		
										Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5	Tingkat Penyediaan Infrastruktur Irigasi	%	100	94,23	94,23	-	10	Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian	%	100	90	90%	100	94,23	94,23
6	Tingkat Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	100	73,3	73,3	Data 2018	11	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	90,11	90,11	100%	100	73,3	73,3
7	Tingkat kawasan pemukiman kumuh	%	0,53	0,53	100%	Data 2018	12	Tingkat kawasan permukiman kumuh	%	0,53	0,47	112,76%	0,53	0,53	100%
8	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan permukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)	%	100	64,63	64,63	Data 2018	13	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan permukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)	%	79,82	85	106,49%	100	64,63	64,63
9	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	83,47	95,89	114,88	-	14	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	81,04	91,47	112,87%	83,47	95,89	114,88
10	angka rata rata lama sekolah	Tahun	7,7	7,82	101,56	-	15	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,65	7,79	101,83%	7,7	7,82	101,56
							16	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,55	12,46	99,28%	12,7	12,61	99,29
11	angka harapan hidup	Tahun	72	70,18	97,47	-	17	Angka Harapan Hidup	Tahun	71	69,95	98,52%	72	70,18	97,47
12	predikat annugrah parahita ekapraya	predikat	Utama	utama	100	-	18	Predikat Anugrah Parahita Kapraya	Predikat	Utama	Utama	100%	Utama	Utama	100
							19	Provinsi Layak Anak (Kabupaten)	Kab/ Kot	3	3	100%	5	7	140



No.	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tujuan	Realisasi	Capaian	Ket.	No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2018			Kinerja 2019		
13	peringkat penyelesaian konflik sosial tingkat nasional	peringkat	terbaik	Pertama	93	akan dinilai April 2020	20	Peringkat Penyelesaian Konflik Sosial Tingkat Nasional	Peringkat	Terbaik Nasional	Pertama	93%	Terbaik Nasional	Pertama	93%
14	indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	indeks	62	59,28	95,61	-	21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,4	56,62	95,32%	62	59,28	95,61
15	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	predikat	BB	B	91,14%	-	22	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kriteria AKIP	BB	B	89,01%	BB	B	91,14
16	opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah	opini	WTP	WTP	100	-	23	Opini BPK terhadap Pengelola Keuangan Daerah	Kriteria Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100

Sumber: Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Februari 2020.



B. CAPAIAN IKU RPJMD 2019-2024

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2019 telah mengimplementasikan 2 (dua) dokumen perencanaan karena tahun 2019 merupakan tahun peralihan Kepala Daerah. Berdasarkan RPJMD 2019-2024 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019, Provinsi Lampung memiliki 7 (tujuh) tujuan dengan 13 (tiga belas) indikator tujuan dan 23 (dua puluh tiga) sasaran dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Ringkasan matrik tujuan, sasaran dan indikator RPJMD 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR
Tujuan 1	1 indikator	Sasaran 1	2 indikator
		Sasaran 2	1 indikator
Tujuan 2	1 indikator	Sasaran 3	1 indikator
Tujuan 3	1 indikator	Sasaran 4	1 indikator
		Sasaran 5	2 indikator
Tujuan 4	2 indikator	Sasaran 6	1 indikator
		Sasaran 7	1 indikator
		Sasaran 8	2 indikator
		Sasaran 9	4 indikator
		Sasaran 10	1 indikator
Tujuan 5	2 indikator	Sasaran 11	1 indikator
		Sasaran 12	1 indikator
		Sasaran 13	1 indikator
		Sasaran 14	1 indikator
Tujuan 6	5 indikator	Sasaran 15	4 indikator
		Sasaran 16	1 indikator
		Sasaran 17	2 indikator
		Sasaran 18	1 indikator
		Sasaran 19	1 indikator
Tujuan 7	1 indikator	Sasaran 20	1 indikator
		Sasaran 21	1 indikator
		Sasaran 22	1 indikator
		Sasaran 23	1 indikator

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2020.



Hasil pengukuran atas IKU Provinsi Lampung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Tujuan dan IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 (RPJMD 2019-2024)

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2019 (Okt-Des 2019)			Ket	target tahun ke-5
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	68,5	73,1	106,72	-	73
2	Tingkat Kriminalitas	Angka	75,6	71,9	105,15	-	92,15
3	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	70	68,67	98,10	-	76
4	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	Angka	45	50	111,11	-	100
5	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	CC	CC	100	-	A
6	Opini BPK/WTP	Opini	WTP	WTP	100	-	WTP
7	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	100	-	A
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	C	B	108,14	-	A
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	72	70,18	97,47	-	72,48
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,55	12,61	100,48	-	12,92
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,7	7,82	101,56	-	8,2
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90,8	90,39	99,55	Data 2018	91,95
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	64,03	63,82	99,67	Data 2018	65,08
14	Jumlah Kab/Kota Layak Anak	Angka	5	7	140	-	15
15	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	Persen	1,86	0,72	39	-	4,49
16	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	Peringkat	4	12	33	POPNAS	3
17	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	Angka	4,17	4,03	103,47	-	3,48
18	Indeks Konektivitas	Indeks	6,01	6,01	100	Data 2018	6,67
19	Rasio Elektrifikasi RumahTangga	Persen	93	97,65	105	Maret 2019	98
20	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP>2	Persen	33	29	87,88	Data 2018	55
21	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman	Persen	71,5	73,3	102,52	-	80,34
22	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	Persen	66,41	52,48	79,02	Data 2018	78,68
23	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	Persen	0,52	0,53	101,92	-	0,37
24	Persentase Rumah tidak Layak huni	Persen	4,5	4,67	96,36	-	1,03
25	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	0,93	1,34	144,09	-	3,19
26	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,46	8,26	110,72	-	6,33
27	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	5,24	7,23	137,98	-	10,73
28	Laju Inflasi	Inflasi	3	3,44	87,21	-	3,0-3,5
29	Angka Kemiskinan	Persen	12	12,3	97,56	-	9,18
30	Indeks Williamson	Indeks	0,21	0,245	85,71	-	0,19
31	PDRB perkapita (Juta)	Indeks	42,94	42,69	99,42	-	56
32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,13	59,28	103,65	-	63,32
33	Indeks Resiko Bencana	Indeks	144,9	144,9	100	-	143,1

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, BAPPEDA, BPS dan Instansi terkait, 2020.



3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

A. RPJMD 2015-2019

Secara umum Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2015-2019.

Jumlah tujuan dalam RPJMD 2015-2019 sebanyak 8 (delapan) tujuan dengan 16 indikator tujuan. Apabila dilihat pencapaian berdasarkan misi dan kategori pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian target tujuan per misi berdasarkan pengukuran kinerja Permendagri 86/2017

No	Misi	Jumlah Indikator Tujuan	Tingkat Pencapaian									
			Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	3	100								
2	Misi 2	6	4	66,67			1	16,67	1	16,67		
3	Misi 3	4	4	100								
4	Misi 4	1	1	100								
5	Misi 5	2	2	100								
	Jumlah	16	14	87,5			1	6,25	1	6,25		

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) tujuan dengan 16 (enam belas) indikator tujuan yang tersebar dalam 5 (lima) Misi dalam Visi Gubernur periode 2015-2019. Pencapaian target tujuan dalam RPJMD 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Misi kesatu memiliki 3 (tiga) indikator tujuan dengan kinerja **Sangat Tinggi**.
2. Misi kedua memiliki 6 (enam) indikator tujuan dengan perincian capaian sebagai berikut: 4 (empat) indikator berkinerja **Sangat Tinggi**, 1 (satu) indikator berkinerja **Sedang**, 1 (satu) indikator berkinerja **Rendah**.
3. Misi ketiga memiliki 4 (empat) indikator tujuan dengan kinerja **Sangat Tinggi**.
4. Misi keempat memiliki 1 (satu) indikator tujuan dengan kinerja **Sangat Tinggi**.
5. Misi kelima memiliki 2 (dua) indikator tujuan dengan kinerja **Sangat Tinggi**.



Masing-masing tujuan diatas didukung dengan 17 (tujuh belas) sasaran dengan 23 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian target IKU per Misi berdasarkan Pengukuran Kinerja Permendagri 86/2017

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									
			Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1 (T1)	8	7	26%							1	4,35
2	Misi 2 (T2)	6	4	17,3%			1	4,3%	1	4,3%		
3	Misi 3 (T3, 4, 5, 6)	6	6	26%								
4	Misi 4 (T7)	1	1	4,3%								
5	Misi 5 (T8)	2	2	8,6%								
	Jumlah	23	20	86,95			1	4,35	1	4,35	1	4,35

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Misi kesatu yang meliputi tujuan 1 memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi** dan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Rendah**.
2. Misi kedua yang meliputi tujuan 2 memiliki 6 (enam) indikator kinerja utama dengan perincian capaian sebagai berikut: 4 (empat) indikator berkinerja **Sangat Tinggi**, 1 (satu) indikator berkinerja **Sedang**, 1 (satu) indikator berkinerja **Rendah**.
3. Misi ketiga yang meliputi tujuan 3, 4, 5 dan 6 memiliki memiliki 6 (enam) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**.
4. Misi keempat yang meliputi tujuan 7 memiliki memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**.
5. Misi kelima yang meliputi tujuan 8 memiliki memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**.



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya.
- c. Kinerja nyata dengan target akhir RPJMD.
- d. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- e. Kinerja nyata dengan kinerja daerah lain atau dengan standar nasional.

1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN RPJMD 2015-2019

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator tujuan sebanyak 8 tujuan dengan 16 indikator tujuan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

TUJUAN 1

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah.

Indikator tujuan 1 yang terdiri dari 3 Indikator:

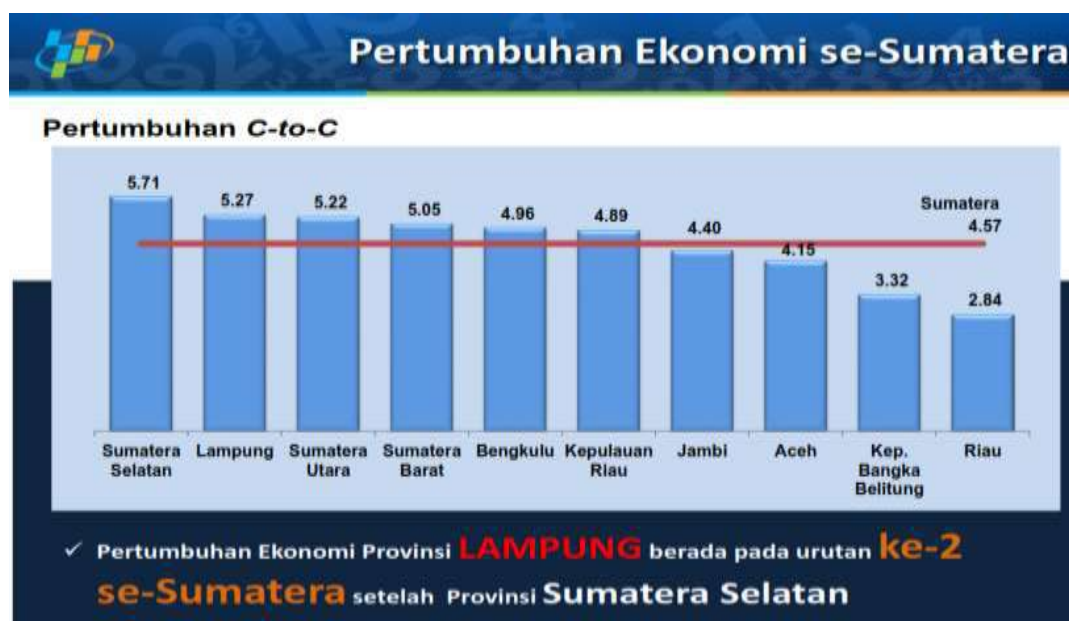
1. Pertumbuhan ekonomi

Target tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah dengan indikator tujuan pertumbuhan ekonomi adalah 5,6%. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **5,27%** dengan kinerja **sangat tinggi** namun **tidak capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **94,11%**.



Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp360,66 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp42,69 juta. Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2019 mengalami pertumbuhan 5,27 persen, sedikit menguat dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,25 persen.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi se Sumatera



Sumber: BRS BPS, Februari 2020

2. Indeks Gini

Target tujuan Target tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah dengan indikator tujuan indeks gini adalah 0,36%. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **0,33** dengan kinerja **sangat tinggi** dan **capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **108,76%**.



Gambar 3.2 Gini Rasio Provinsi Lampung dan Nasional

Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau pemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Apabila nilai Indeks Gini 0 artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Bulan (Semester)	Gini Ratio									
	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan			
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2018
PROVINSI LAMPUNG										
Maret	0.40	0.39	0.30	0.35	0.33	0.36	0.38	0.36	0.33	0.35
September	0.40	0.31	0.36	0.31	0.38	0.32	0.35	0.36	0.33	0.32
NASIONAL										
Maret	0.43	0.41	0.41	0.33	0.33	0.36	0.41	0.39	0.39	0.38
September	0.42	0.40	0.40	0.32	0.32	0.32	0.40	0.39	0.39	0.38

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2018

Capaian Provinsi Lampung pada Tahun 2017 adalah **0,33** dimana lebih rendah dari capaian Nasional yang mencapai 0,391 pada Tahun yang sama. Pada tahun 2018 ini indeks gini Provinsi Lampung semakin baik dengan capaian sebesar 0,326. Dengan demikian tingkat pendapatan Provinsi Lampung pada Tahun 2018 lebih merata dari pada tingkat pendapatan tahun 2017. Namun capaian Nasional indeks Gini di Tahun 2018 sebesar 0,389 lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 0,32. Hal ini disebabkan adanya ekspektasi kenaikan signifikan upah minimum di Tahun 2018 yang tidak tercapai sehingga mengakibatkan tekanan pada pengeluaran masyarakat kelompok bawah.



Profil Kemiskinan Provinsi Lampung Maret 2019

3. Angka Kemiskinan

Target tujuan dalam RPJMD 2015-2019 untuk indikator angka kemiskinan adalah 12,36 % dan capaian target adalah **12,62%**. Capaian target tujuan ini apabila diperbandingkan antara target dan realisasi maka kinerja mencapai **98,1%** dengan kriteria kinerja **sangat tinggi**.

- Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,06 juta orang (12,62 persen), berkurang sebesar 27,9 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 1,09 juta orang (13,01 persen).
- Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 9,06 persen turun menjadi 8,92 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 14,73 persen turun menjadi 14,27 persen pada Maret 2019.
- Selama periode September 2018 - Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 1,66 ribu orang (dari 230,20 ribu orang pada September 2018 menjadi 231,86 ribu orang pada Maret 2019), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 29,6 ribu orang (dari 861,40 ribu orang pada September 2018 menjadi 831,80 ribu orang pada Maret 2019).

Gambar 3.3 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Maret 2020.

TUJUAN 2

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana utilitas dasar wilayah.

Indikator Tujuan 2 yang terdiri dari 6 (enam) indikator:

1. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi

Target tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana utilitas dasar wilayah dengan indikator tujuan kondisi kemantapan jalan provinsi adalah 85%. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **77,23%** dengan kinerja **sangat tinggi** namun **tidak capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **90,86%**.

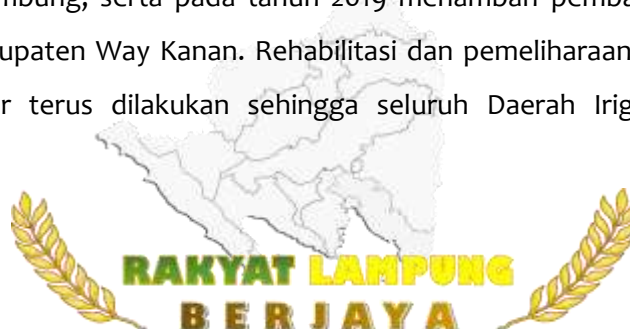


Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Tahun 2019, kondisi kemantapan jalan provinsi lampung realisasi adalah **77,23%** dari target dalam RPJMD sebesar 85% maka kinerja (data 2018), tingkat kemantapan tidak mengalami kenaikan yang signifikan jika di bandingkan dengan kondisi tahun 2017 yang sudah mencapai 77%. Kondisi ini disebabkan karena pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Lampung terikat kontrak dengan PT. SMI untuk menangani 6 (enam) ruas jalan Provinsi sampai tuntas sepanjang 132,193 Km. Dalam kontrak tersebut, kelebihan anggaran tidak dapat dipakai untuk menangani ruas provinsi lainnya, sehingga dimanfaatkan untuk pelebaran jalan diruas SMI dari 4,5 m menuju 6 m. Dampak dari kondisi ini adalah alokasi anggaran untuk ruas provinsi lainnya menjadi kecil yang berakibat pada minimnya prosentase tingkat kemantapan jalan. Adapun jika dibandingkan dengan kondisi kemantapan jalan tahun 2015 dan 2016, dimana tingkat kemantapan jalan di Provinsi Lampung mencapai 67,02 meningkat menjadi 70,02 dan meningkat lagi menjadi 77 pada Tahun 2017 lalu, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi lonjakan kemantapan jalan dalam kurun waktu 3 tahun antara 2015 s/d 2017.

2. Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian

Target tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana utilitas dasar wilayah dengan indikator tujuan Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian adalah 100%. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **94,23%** dengan kinerja **sangat tinggi** namun **tidak capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **94,23%**.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Provinsi Lampung melakukan percepatan penanganan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi melalui pengelolaan dan pemeliharaan bendungan/waduk Batutege di Kabupaten Tanggamus, Bendungan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur serta Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara. Pembangunan embung terus dilakukan sehingga semula berjumlah 85 buah pada tahun 2015, bertambah menjadi total 148 buah embung pada tahun 2017, pada tahun 2018 membangun 5 buah embung, serta pada tahun 2019 menambah pembangunan embung sebanyak 5 titik di Kabupaten Way Kanan. Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan dengan cakupan 21.045 Hektar terus dilakukan sehingga seluruh Daerah Irigasi kewenangan



provinsi yang berjumlah 19 DI sudah teratasi dan dalam kondisi baik. Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi menganggarkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp. 163

Milyar untuk 16 Daerah Irigasi yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Barat. Kemudian pada tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50 Milyar untuk melanjutkan sisa perbaikan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi Semaka Kabupaten Tanggamus, Daerah Irigasi Kalipasir di Kabupaten Lampung Timur, Daerah irigasi Way Kandis Kabupaten Lampung Selatan serta Daerah Irigasi Way Napal Kabupaten Pesawaran. Untuk tahun 2018 Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp. 70 Milyar untuk mempertahankan kondisi jaringan irigasi. Hal ini dilakukan agar kondisi jaringan irigasi dengan panjang saluran primer 75.102 Meter dan panjang saluran sekunder 96.000 Meter tetap dalam kondisi baik mencapai 90%. Berikut perkembangan kondisi jaringan irigasi kewenangan Provinsi Lampung.

3. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak

Target tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana utilitas dasar wilayah dengan indikator tujuan tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah 100%. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **73,3%** dengan kinerja **sedang** dan **tidak capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **73,3%**.

4. Tingkat kawasan permukiman kumuh

Target tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana utilitas dasar wilayah dengan indikator tujuan tingkat kawasan permukiman kumuh adalah 0,53%. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **0,53%** dengan kinerja **sangat tinggi** dan **capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **100%**.

5. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)

Target tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana utilitas dasar wilayah dengan indikator tujuan tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah) adalah 100%. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **64,63%** dengan kinerja **rendah** dan **tidak capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **64,63%**.



6. Rasio elektrifikasi rumah tangga

Target tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana utilitas dasar wilayah dengan indikator tujuan rasio elektrifikasi rumah tangga adalah 83,47%. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **95,89%** dengan kinerja **sangat tinggi** dan **capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **114,88%**.

TUJUAN 3

Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Indikator tujuan 3 yang terdiri dari 1 (satu) indikator:

Angka rata-rata lama sekolah

Target tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator tujuan angka rata-rata lama sekolah adalah 7,7 tahun. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **7,82** tahun dengan kinerja **sangat tinggi** dan **capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **101,56%**.

Rata-rata Lama Sekolah di Lampung tumbuh 0,09 persen per tahun selama periode 2014 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2018, secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 7,82 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I).

TUJUAN 4

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Indikator tujuan 4 yang terdiri dari 1 (satu) indikator:

Angka harapan hidup

Target tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan angka harapan hidup adalah 72 tahun. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi kinerja **70,18** tahun dengan kinerja **sangat tinggi** namun tidak **capai target**. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai **97,47%**.

Selama 5 tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Provinsi Lampung telah meningkat dari 69,66 di tahun 2015 menjadi 70,18 di tahun 2018 atau meningkat 0,52 tahun. AHH Provinsi Lampung mencapai peringkat 3 di Sumatera setelah Provinsi Riau (73,12) dan



Jambi (72.80). Pada tahun 2018, penduduk Provinsi Lampung memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 9,86 juta rupiah per tahun, meningkat 445 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas.

TUJUAN 5

Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

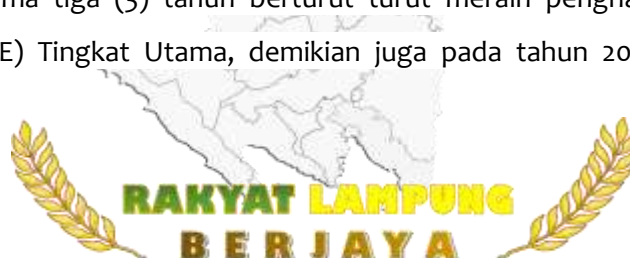
Indikator tujuan 5 yang terdiri dari 1 (satu) indikator:

Predikat Anugerah Parahita Ekapraya

Target tujuan meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator tujuan predikat anugerah parahita ekapraya adalah peringkat utama. Untuk capaian indikator ini data yg digunakan adalah data tahun 2018 karena untuk capaian 2019 akan dirilis di pertengahan tahun berikutnya. Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2018 telah mencapai predikat **utama** dan kinerja dan kinerja mencapai 100% dengan kategori kinerja **sangat tinggi** dan **capai target**.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut “Anugerah Parahita Ekapraya” (APE). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) berarti suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Tiga Kategori Penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) : Tingkat Pratama (Pemula); Tingkat Madya (Pengembang) dan Tingkat Utama (Peletakan dasar dan Keberlanjutan). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dinilai dari 7 (Tujuh) Komponen kunci, terdiri dari: Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, Partisipasi Masyarakat.

Provinsi Lampung selama tiga (3) tahun berturut turut meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama, demikian juga pada tahun 2016. Penghargaan



bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

TUJUAN 6

Mewujudkan Kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran

Indikator tujuan 6 yang terdiri dari 1 (satu) indikator:

Peringkat penyelesaian Konflik sosial tingkat nasional

Target tujuan meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran dengan indikator peringkat penyelesaian konflik sosial tingkat nasional adalah peringkat pertama. Untuk capaian indikator ini data yg digunakan adalah data tahun 2018 karena untuk capaian 2019 akan dirilis pada bulan Mei tahun 2020. Rilis peringkat Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2018 dipublikasikan pada bulan mei 2019 dan telah mencapai predikat **pertama** dan kinerja mencapai **100%** dengan ketgori kinerja **sangat tinggi** dan **capai target**.

Penghargaan ini diberikan kepada lima provinsi dengan nilai tertinggi, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta (peringkat 2), Maluku Utara (peringkat 3) dan keempat Provinsi Lampung, serta kelima Provinsi Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didampingi Menteri Dalam Negeri kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung di Jakarta 16 mei 2019 atas kinerja 2018.

TUJUAN 7

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan

Indikator tujuan 7 yang terdiri dari 1 (satu) indikator:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target tujuan mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 62 dengan satuan indeks. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai indeks **59,28** dan kinerja **sangat tinggi** dan **tidak capai target**. Capaian realisasi kinerja mencapai **95,61%**.

IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat



digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

TUJUAN 8:

Mengembangkan pemerintah yang baik dan antisipatif

Indikator tujuan 8 yang terdiri dari 2 (dua) indikator:

1. Hasil Evaluasi AKIP

Target tujuan mengembangkan pemerintah yang baik dan antisipatif dengan indikator tujuan hasil evaluasi AKIP adalah BB. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi **B** dan kinerja **sangat tinggi** namun **tidak capai target**. Capaian realisasi kinerja mencapai **91,14%**.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP), di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tabel 3.8 Capaian Evaluasi SAKIP Provinsi Lampung dari tahun 2015-2019:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				Nilai/Bobot
			2016	2017	2018	2019	x 100 %
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,33	20,85	20,86	21,06	70,20%
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,07	14,14	14,24	14,60	58,40%
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,30	9,25	9,80	10,07	67,13%
d.	Evaluasi Internal	10	5,32	5,67	5,67	6,12	61,20%
e.	Capaian Kinerja	20	10,31	11,45	11,74	11,94	59,70%
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,33	61,36	62,31	63,80	
Predikat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	

Sumber: Biro Organisasi, Februari 2020.



2. Opini BPK

Target tujuan mengembangkan pemerintah yang baik dan antisipatif dengan indikator tujuan opini BPK adalah WTP. Pemerintah Provinsi Lampung telah mencapai realisasi WTP dan kinerja **sangat tinggi** dan **capai target**. Capaian realisasi kinerja mencapai 100%.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD 2015-2019

Secara keseluruhan **tujuan** dalam RPJMD 2015-2019 ditopang melalui 17 sasaran dengan 23 indikator kinerja utama yang tersebar dalam 5 misi. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1									
Sasaran 1	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung								
IKU _(1/23)	Laju pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan								
Satuan	Persentase								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.69	3.66	4.16	3.16	4.39	4.48	4.42	4.01	4.48	4,07

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Kehutanan; Dinas Kelautan dan Perikanan, Februari 2020

Sasaran Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator **Laju pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan** dengan capaian sebesar 4.07% dari target sebesar 4.48% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **90.85%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Namun capaian ini meningkat 0,13% dari tahun sebelumnya.

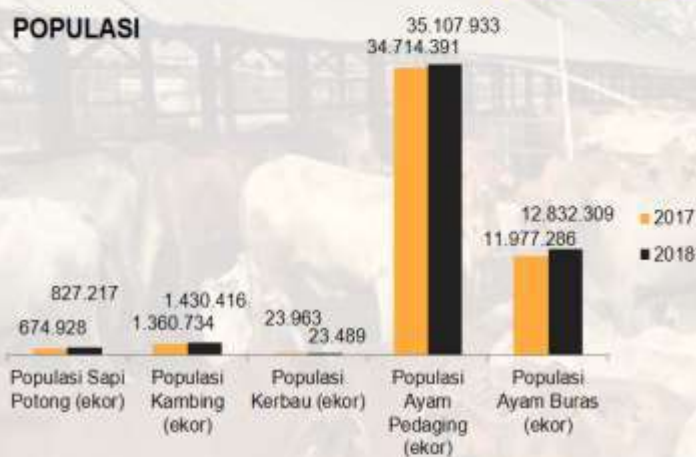


Gambar 3.4 Produksi Pertanian, Peternakan Provinsi Lampung



SEKTOR PETERNAKAN

POPULASI



PRODUKSI DAGING DAN TELUR



Populasi ternak provinsi Lampung terus mengalami peningkatan, baik sapi, kambing maupun unggas. Melalui program UPSUS SIWAB (Inseminasi Buatan), populasi sapi Lampung meningkat 22,5% di tahun 2018.

Bbrp hal yang dilakukan Untuk meningkatkan populasi antara lain

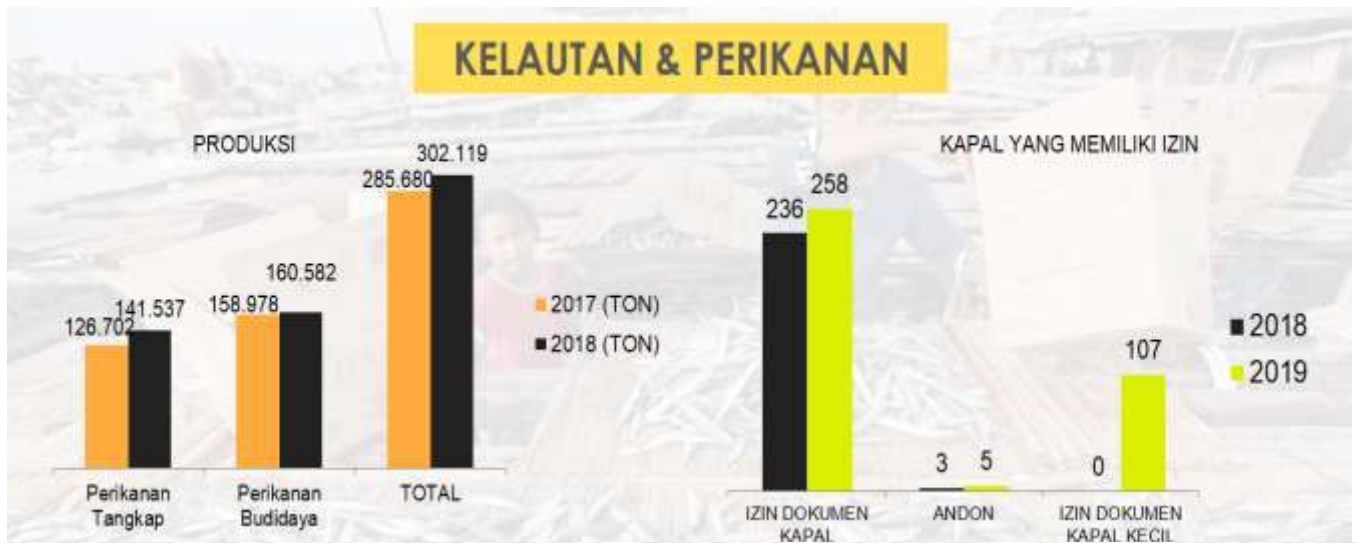
- ❖ pada akhir tahun 2019 ini, Pemprov Lampung telah menambah jumlah pejantan sapi unggul sebanyak 4 ekor (simerital 2 ekor dan limosin 2 ekor dari jumlah eksisting 2019 sebanyak 12 ekor sehingga saat ini terdapat 16 ekor sapi bibit unggul, untuk mendukung Program UPSUS SIWAB tahun 2020 dengan target 200.000 akseptor.
- ❖ pemberian bibit *Belgian Blue* untuk meningkatkan potensi perbaikan berat badan sapi menjadi 2 ton/ekor

Produksi Daging sapi dan unggas terus mengalami peningkatan di tahun 2018, produksi daging sapi meningkat sebesar 2,56 % dan unggas naik 3,08% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017.

Sumber: BAPPEDA, Maret 2020



Gambar 3.5 Produksi Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung



- ❖ Total produksi tahun 2018 adalah 302 ribu Ton, naik sebesar 17 ribu ton dari produksi tahun 2017 sebesar 285ribu Ton.
- ❖ Melihat izin yang telah dikeluarkan, maka pada tahun 2019 ini telah dikeluarkan izin sebanyak 258 kapal, 5 kapal andon dan 107 izin dokumen kapal kecil dengan penambahan secara total sebesar 131 jika dibandingkan tahun 2018. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah kapal yang memiliki izin maka akan meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap.

Beberapa upaya/program yang dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi perikanan di prov Lampung antara lain:

- ❖ Program Nelayan Berjaya sebagai bagian dari program KPB yakni dengan peningkatan penyediaan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang selama ini beroperasi di 2 (dua) pelabuhan yaitu, Pelabuhan Lempasing dan Labuhan Maringgai, serta akan ditambah dengan melakukan rehabilitasi pelabuhan Kota Agung di tahun 2019 ini dan mengaktifkan kembali operasionalnya di tahun 2020.
- ❖ *Ground Breaking* Pembangunan Dermaga Jetty di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing

Sumber: BAPPEDA Maret 2020

Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran 2.1

Sasaran 2									
Sasaran	Peningkatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, UMKM dan Koperasi terhadap PDRB Provinsi Lampung								
IKU ^(2/23)	Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7.48	-	7.44	3.89	7.46	6.18	7.46	9.08	7.46	10,1

Sumber: Dinas Perindustrian, Februari 2020

Sasaran peningkatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, UMKM dan Koperasi terhadap PDRB Provinsi Lampung dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator. Capaian kinerja pada indikator **Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan** adalah sebesar 10,1% dari target sebesar 7.46% yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga



persentase capaian kinerjanya adalah 135,39% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini meningkat 13,68% dari tahun sebelumnya

Beberapa faktor pendukung dalam mencapai indikator ini adalah pelaku usaha melakukan diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah produk sehingga akses pasar menjadi luas, serta peningkatan pertumbuhan industri mikro dan kecil.

Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran 2.2

Sasaran 2									
Sasaran		Peningkatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, UMKM dan Koperasi terhadap PDRB Provinsi Lampung							
IKU_(3/23)		Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi							
Satuan		Persen							
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	7,8

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, Februari 2020

Sasaran peningkatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, UMKM dan Koperasi terhadap PDRB Provinsi Lampung pada indikator ke-2 **Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi** pada tahun 2019 mencapai 7,8% dari target 4,5% dan melebihi target dari yang diperjanjikan. Indikator sasaran ini pada tahun 2018 belum memiliki target kinerja sehingga **tidak dapat memperbandingkan kinerja tahun sebelumnya**. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 akhir Provinsi Lampung telah melaksanakan penyempurnaan IKU Provinsi Lampung dan indikator pada sasaran ke-2 ini merupakan salah satu penyempurnaan yang **akan direalisasikan** pada tahun 2019.

Tabel 3.12 Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3									
Sasaran		Peningkatan pertumbuhan sub sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung							
IKU_(4/23)		Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan							
Satuan		Persen							
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	1,98	4,4	6,54	5,48	6,51	4,76	6,87	5,24	9

Sumber: Dinas Perdagangan, Februari 2020

Sasaran peningkatan pertumbuhan sub sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung dapat dilihat dari 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **laju pertumbuhan sektor perdagangan** adalah sebesar 9 dari target sebesar 5,24 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 171,76% dengan



kategori kinerja adalah **Sangat Tinggi** dan melebihi target yang **diperjanjikan**. Capaian ini meningkat 27,43% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.13 Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4									
Sasaran	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas kerja								
IKU ^(5/23)	Tingkat Pengangguran Terbuka								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5.29	5.48	5.01	4.62	4.74	4.88	4.45	4.06	4.17	4,03

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Februari 2020

Sasaran meningkatnya kompetensi dan produktivitas kerja dapat dilihat dari 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah sebesar 4.03 dari target sebesar 4.17 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103.47% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan melebihi target yang **diperjanjikan**. Namun capaian ini menurun 6,13% dari kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3.14 Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5									
Sasaran	Peningkatan penanaman modal (investasi) daerah								
IKU ^(6/23)	Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga konstan								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	13.24	9.04	14.56	4,62

Sumber: BPS, Maret 2020

Sasaran Peningkatan pertumbuhan sub sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung dapat dilihat dari 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga konstan adalah sebesar 4,62 dari target sebesar 14,56 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **31,73%** dengan kategori kinerja **Sangat Rendah** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Capaian ini menurun 36,55% dari tahun sebelumnya.

Permasalahan yang ditemukan sehingga sasaran Peningkatan penanaman modal (investasi) daerah tidak tercapai adalah kurang maksimalnya program/kegiatan promosi terhadap menggali potensi/kekayaan di Provinsi Lampung, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber



daya yang mendukung program/kegiatan yang dimaksud. Selain itu pada tahun 2019 banyak terdapat proyek di Provinsi Lampung yang telah bergeser nilai investasinya menjadi sumber PAD Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka beberapa solusi tepat yang dapat diterapkan adalah penyediaan sumber daya yang mendukung program/kegiatan promosi potensi yang dimiliki Provinsi Lampung sehingga menarik para investor untuk memulai investasinya di Provinsi Lampung.

Tabel 3.15 Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6									
Sasaran	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata pada perekonomian daerah								
IKU (7/23)	Rata-rata pengeluaran wisatawan								
Satuan	Juta Rp								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	1.2	1.22	1.375	1,368

Sumber: Dinas Pariwisata, Februari 2020

Sasaran Meningkatnya kinerja sektor pariwisata pada perekonomian daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja nyata indikator ke-1 **rata-rata pengeluaran wisatawan** adalah sebesar 1.368 juta rupiah dari target sebesar 1.375 juta rupiah yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,49% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi**. Namun capaian ini menurun 2,18% dari tahun sebelumnya dan capaian ini tidak capai target yang diperjanjikan.

Tabel 3.16 Pencapaian Sasaran 7

Sasaran 7									
Sasaran	Peningkatan PAD								
IKU (8/23)	Laju pertumbuhan PAD								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.64	2.55	3.23	5.24	3.25	8.07	3.26	5.16	3.28	4,38

Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran Peningkatan PAD dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **Laju pertumbuhan PAD** adalah sebesar 4,38% dari target sebesar 3,28% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 133,54% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan melebihi target yang **diperjanjikan**. Namun capaian kinerja ini menurun 24,74% dari tahun sebelumnya.



Tabel 3.17 Pencapaian Sasaran 8.1

Sasaran 8									
Sasaran	Tersedianya infrastruktur prasarana dan sarana yang handal								
IKU (9/23)	Kondisi kemantapan jalan provinsi								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
65	67.02	70	70.02	75	77	80	72,23	85	77,23

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Lampung, Januari 2020

Sasaran tersedianya infrastruktur prasarana dan sarana yang handal dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **Kondisi kemantapan jalan provinsi** adalah sebesar 77,23 dari target sebesar 85 yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **90,86%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Capaian kinerja ini menurun 5,68% dari tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja tahun 2019 menggunakan data di tahun 2018 karena rilis dari realisasi indikator ini baru akan di publis pada bulan desember 2019. Beberapa permasalahan yang ditemukan sehingga sasaran tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana yang handal tidak tercapai adalah sebagai berikut:

1. Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan jalan di beberapa jalur jalan provinsi sehingga faktor bencana alam menjadi faktor inprediksional.
2. Kurang maksimalnya maintenance/perawatan maksimal terhadap jalur/jalan provinsi yang setiap tahunnya pasti akan mengalami degradasi 5-10%. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya yang mengampu program dan kegiatan perawatan jalan provinsi yang dimaksud.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka beberapa solusi tepat yang dapat diterapkan adalah penyediaan sumber daya yang mendukung program/kegiatan penanganan pertama bencana alam serta perawatan jalan pemerintah agar dapat mencapai target.



Tabel 3.18 Pencapaian Sasaran 8.2

Sasaran 8									
Sasaran	Tersedianya infrastruktur prasarana dan sarana yang handal								
IKU ^(10/23)	Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
65	65	70	80	100	89	100	90	100	94,23

Sumber: Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Gambar 3.13 Irigasi Pertanian

Sasaran Tersedianya infrastruktur prasarana dan sarana yang handal dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian** adalah sebesar 94,23% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94,23% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Namun capaian kinerja ini meningkat 4,23% dari tahun sebelumnya.

Permasalahan yang ditemukan sehingga indikator penyediaan infrastruktur irigasi pertanian tidak capai target adalah sebagai berikut:

1. Tidak terintegrasinya Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Faktor alam dimana Lampung memiliki curah hujan tinggi sehingga dalam menjaga jalur irigasi pertanian memiliki perawatan yang ekstra;
3. Kurang maksimalnya maintenance/perawatan jalur irigasi pertanian yang berkaitan dengan anggaran sehingga kegiatan maintenance tidak dapat berjalan maksimal.

Solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini adalah kebijakan dalam pengintegrasian daerah irigasi per wilayah melalui penyediaan dan penggunaan anggaran yang konsisten terhadap kebutuhan kegiatan terkait jalur irigasi pertanian.



Tabel 3.19 Pencapaian Sasaran 9.1

Sasaran 9									
Sasaran	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah, listrik)								
IKU ^(11/23)	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
68.82	68.82	74.34	74.51	82.2	87.2	90.11	90,11	100	71,65

Sumber: Dinas Cipta Karya dan SDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah, listrik) dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator. Capaian kinerja pada indikator **Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak** adalah sebesar **71,65%** dari target sebesar 100% yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 71,65% dengan kategori kinerja Sedang dan tidak capai target yang **diperjanjikan**. Capaian ini menurun 26,7% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.20 Pencapaian Sasaran 9.2

Sasaran 9									
Sasaran	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah, listrik)								
IKU ^(12/23)	Tingkat kawasan permukiman kumuh								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.11	2.11	1.93	1.8	1.41	0.27	0.53	0.47	0,53	0,53

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah, listrik) dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator. Capaian kinerja pada indikator ke-2 **Tingkat kawasan permukiman kumuh** adalah sebesar dari target sebesar 0.53 yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan capaian ini **sesuai target** yang **diperjanjikan**. Namun capaian kinerja ini menurun 12,76% dari tahun sebelumnya.



Tabel 3.21 Pencapaian Sasaran 9.3

Sasaran 9									
Sasaran	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah, listrik)								
IKU ^(13/23)	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
50.71	50.71	62.86	62.45	67.78	79.90	79.82	85	100	64,63

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah, listrik) dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator. Capaian kinerja pada indikator ke-3 **Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan pemukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)** adalah sebesar 64,63% dari target sebesar 100% yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 64,63% dengan kategori kinerja rendah dan tidak capai target yang **diperjanjikan**. Capaian ini menurun 41,86% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.22 Pencapaian Sasaran 10

Sasaran 10									
Sasaran	Meningkatnya rumah tangga yang berlistrik								
IKU ^(14/23)	Rasio elektrifikasi rumah tangga								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
74.16	80.46	76.38	84.71	78.68	84.15	81.04	91.47	83.47	95,89

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya rumah tangga yang berlistrik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **rasio elektrifikasi rumah tangga** adalah sebesar 95,89% dari target sebesar 83,47% yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114,88% dengan kategori kinerja sangat tinggi dan melebihi target yang **diperjanjikan**. Capaian kinerja ini meningkat 2,01% dari tahun sebelumnya.



Tabel 3.23 Pencapaian Sasaran 11.1

Sasaran 11									
Sasaran	Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun								
IKU ^(15/23)	Angka rata-rata lama sekolah								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
7.5	7.5	7.55	7.56	7.6	7.79	7.65	7.79	7.7	7,82

Sumber: BPS, Maret 2020

Sasaran Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator. Capaian kinerja pada indikator ke-1 **angka rata-rata lama sekolah** adalah sebesar 7.82 dari target sebesar 7.7 yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.56% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan capaian ini melebihi target yang **diperjanjikan**. Namun capaian kinerja ini menurun 0,27% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.24 Pencapaian Sasaran 11.2

Sasaran 11									
Sasaran	Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun								
IKU ^(16/23)	Angka harapan lama sekolah								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	12.55	12.46	12.48	12,61

Sumber: BPS, Maret 2020

Sasaran Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator. Capaian kinerja pada indikator ke-2 **angka harapan lama sekolah** adalah sebesar 12.61% dari target sebesar 12.48% yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.28% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun tidak capai target yang **diperjanjikan**. Namun capaian kinerja ini meningkat 0,01% dari kinerja tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada sasaran meningkatnya tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun adalah adanya belum optimalnya penggunaan sumber daya yang ada baik secara materi atau pun non materi dalam upaya memaksimalkan program/kegiatan yang mendukung dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah.



Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka beberapa solusi tepat yang dapat diterapkan adalah meningkatkan sumber daya secara kualitas maupun kuantitas yang mendukung program/kegiatan yang mendukung peningkatan angka harapan lama sekolah.

Tabel 3.25 Pencapaian Sasaran 12

Sasaran 12									
Sasaran	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat								
IKU (17/23)	Angka Harapan Hidup								
Satuan	Persen								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
69.75	70	69.85	69.94	70	69.95	71	69.95	72	70,18

Sumber: BPS, Maret 2020

Sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **angka harapan hidup** adalah sebesar 70,18% dari target sebesar 72% yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,47% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun tidak capai target yang diperjanjikan. Capaian ini menurun 1,05% dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat adalah adanya faktor alam dimana Lampung memiliki curah hujan tinggi sehingga penyakit musiman seperti Demam Berdarah dan Malaria yang menjadi indikator pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tidak tercapai. Selain itu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, pola konsumsi pangan baik, dan kualitas lingkungan perumahan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka beberapa solusi tepat yang dapat diterapkan adalah penyediaan sumber daya (tenaga medis) serta sarana prasarana kesehatan yang memadai pada setiap Puskesmas sebagai tempat rujukan bilamana masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Selain itu meningkatkan program/kegiatan terkait upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, pola konsumsi pangan baik, dan kualitas lingkungan perumahan.



Tabel 3.26 Pencapaian Sasaran 13.1

Sasaran 13									
Sasaran	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak								
IKU (18/23)	Predikat Anugrah Parahita Ekapraya								
Satuan	Predikat								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	Utama	Utama	Utama	Utama

Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator ke-1 **predikat Anugrah Parahita Ekapraya** adalah predikat utama dari target predikat utama yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan **sesuai target** yang **diperjanjikan**.

Tabel 3.27 Pencapaian Sasaran 13.2

Sasaran 13									
Sasaran	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak								
IKU (19/23)	Provinsi Layak Anak (Kabupaten)								
Satuan	Kabupaten/Kota								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
0	1	0	0	2	-	3	3	5	7

Sumber: Dinas PPPA, Februari 2020

Sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator. Capaian kinerja pada indikator ke-2 **Provinsi layak anak** adalah sebesar 7 Kabupaten/Kota dari target sebesar 5 Kabupaten/Kota yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kerjanya adalah 140% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi dan **melebihi target** yang **diperjanjikan**. Capaian kinerja ini meningkat 40% dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor pendukung yang menunjang penacapaian kinerja adalah komitmen Bupati/Walikota untuk Pencapaian KLA (Deklarasi KLA) melalui pemenuhan 5 (lima) klaster dan 24 (dua puluh empat) indikator KLA. Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran ini terdapat beberapa kendala yaitu koordinasi dengan OPD terkait yang kurang optimal, kurangnya SDM yang memadai, anggaran kabupaten/kota masih terbatas dan regulasi yang belum terpenuhi. Namun kendala ini dapat teratasi dengan melaksanakan advokasi KDH melalui OPD di Lingkungan Kabupaten/Kota, sosialisasi mengenai KLA kepada OPD dan masyarakat, pelatihan SDM tentang pengisian KLA melalui aplikasi, adanya fasilitator KLA untuk Kabupaten/Kota, merekrut tenaga sukarela.



Tabel 3.28 Pencapaian Sasaran 14

Sasaran 14									
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan dan Keagamaan yang Toleran.								
IKU ^(20/23)	Peringkat Penyelesaian Konflik Sosial Tingkat Nasional								
Satuan	Peringkat								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	Terbaik Nasional	Pertama	Terbaik Nasional	Pertama

Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **peringkat penyelesaian konflik sosial tingkat nasional** adalah peringkat pertama dari target peringkat terbaik nasional yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93%, capaian ini **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Namun capaian kinerja ini meningkat 1% dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target peringkat terbaik nasional pada sasaran meningkatnya kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran adalah penerapan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam penanganan konflik sosial yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga pencapaian target tidak maksimal. Hal ini dikarenakan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan RAD terutama pada tahap pencegahan belum optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan konsistennya perencanaan serta penganggaran terhadap kebutuhan penyelenggaraan RAD penanganan konflik sosial.



Tabel 3.29 Pencapaian Sasaran 15

Sasaran 15									
Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
IKU ^(21/23)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)								
Satuan	Indeks								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	59.4	56.62	62	59,28

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** adalah sebesar 59,28 dari target sebesar 62 yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95.61% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi namun tidak capai target yang **diperjanjikan**. Namun capaian kinerja ini meningkat 0,29% dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah kurang konsistensinya pendelegasian tugas dan fungsi OPD dalam hal kegiatan penutupan lahan sehingga tidak mampu mengejar ketertinggalan nilai IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) karena sumber daya yang ada tidak cukup secara kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah mengoptimalkan serta konsisten terhadap pendelegasian tugas dan fungsi OPD yang menangani tutupan lahan serta konsisten terhadap perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan terkait dengan upaya mengejar ketertinggalan tutupan lahan (nilai IKTL).



Tabel 3.30 Pencapaian Sasaran 16

Sasaran 16									
Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								
IKU (22/23)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								
Satuan	Predikat								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
C	CC	CC	CC	B	B	BB	B	BB	B

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** adalah predikat B dari target predikat BB yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kerjanya adalah 91,14% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi namun tidak capai target yang **diperjanjikan**. Namun capaian kinerja ini meningkat 2,13% dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target BB pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan IKU tidak memperhatikan proses kerja yang telah dibangun serta tugas fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan. Sehingga masih ditemukan kinerja yang tidak pada levelnya. Selain itu mekanisme cascade kinerja tidak berpedoman pada proses bisnis organisasi;
2. Perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi pada satuan kerja tidak sepenuhnya mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran. Belum seluruh program dan kegiatan selaras dengan sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh inspektorat belum mampu memicu perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah dan juga pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
4. Pemantauan/monitoring terhadap capaian kinerja tidak berjalan optimal. Hal ini dikarenakan, informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja tidak efektif memicu berbagai perbaikan yang diperlukan.
5. Belum maksimalnya kinerja dan pemenuhan tugas dan fungsi tim SAKIP Daerah karena belum tersedianya anggaran yang mengcover kegiatan tim SAKIP walaupun eksistensinya tim terbentuk dan terdiri dari BAPPEDA, Inspektorat, Organisasi, dan BKD.



Berdasarkan uraian permasalahan di atas serta lebih mengefektifkan upaya pencapaian target maka beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Cascade kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian penyusunan IKU akan mengacu pada cascade kinerja tersebut.
2. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas baik secara internal maupun pada pemerintah kabupaten/kota dengan meningkatkan kapasitas evaluator inspektorat sehingga mampu memberikn saran perbaikan yang konstruktif kepada OPD.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan/monitoring capaian kinerja secara berkala oleh OPD dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai pemberian dasar reward dan punishment.
4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim SAKIP daerah dengan memberikan dukungan anggaran sehingga kinerja tim SAKIP dapat maksimal.

Tabel 3.31 Pencapaian Sasaran 17

Sasaran 17									
Sasaran	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah								
IKU ^(23/23)	Opini BPK terhadap Pengelola Keuangan Daerah								
Satuan	Opini								
2015		2016		2017		2018		2019	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator. Capaian kinerja pada indikator **Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah** adalah Opini WTP target Opini WTP yang direncanakan *dalam perjanjian kinerja tahun 2019* sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **sesuai target** yang **diperjanjikan**.



B. RPJMD 2019-2024

Berdasarkan RPJMD 2019-2024 telah ditetapkan 17 (tujuh belas) sasaran dengan 23 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Capaian target IKU per Misi RPJMD 2019-2024

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian										
			Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah		
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Misi 1 (T1, T2)	4	4	12,12									
2	Misi 2 (T3)	4	4	12,12									
3	Misi 3 (T4)	9	7	21,21							2	6,06	
4	Misi 4 (T5)	7	5	15,15	1	3,03	1	3,03					
5	Misi 5 (T6)	7	5	15,15	2	6,06							
6	Misi 6 (T7)	2	2	6,06									
	Jumlah	33	28	84,84	3	9,1					2	6,06	

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Misi kesatu yang meliputi tujuan 1 dan 2 memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**.
2. Misi kedua yang meliputi tujuan 3 memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama dengan perincian capaian sebagai berikut: 4 (empat) indikator berkinerja **Sangat Tinggi**.
3. Misi ketiga yang meliputi tujuan 4 memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi** dan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan kinerja sangat rendah.
4. Misi keempat yang meliputi tujuan 5 memiliki 5 (lima) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**; 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kinerja **Tinggi** dan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sedang**.
5. Misi kelima yang meliputi tujuan 6 memiliki 5 (lima) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi** dan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan kinerja **Tinggi**.
6. Misi keenam yang meliputi tujuan 7 memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama dengan kinerja **Sangat Tinggi**.



Analisis pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung tahun 2019 berdasarkan RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Pencapaian Sasaran 1.1

Sasaran 1			
Sasaran 1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah		
IKU ^(1/33)	Indeks kerukunan umat beragama		
Satuan	Angka		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
68,5	73,1	73	-

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah memiliki 2 indikator. Indikator kinerja pertama adalah **Indeks kerukunan umat beragama** dengan capaian sebesar 73,1 dari target sebesar 68,5 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **106,72%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 100,14%.

Gambar 3.6 Koordinasi Lembaga Non Pemerintah

KOORDINASI EFEKTIF DENGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH



Tabel 3.34 Pencapaian Sasaran 1.2

Sasaran 1			
Sasaran 1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah		
IKU ^(2/33)	Tingkat kasus kriminalitas terselesaikan		
Satuan	Angka		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
75,6	71,9	92,15	-

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah memiliki 2 indikator. Indikator kedua adalah **tingkat kriminalitas terselesaikan** dengan capaian sebesar 71,9 dari target sebesar 75,6 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kerjanya adalah **95%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 78,02%.

Gambar 3.7 Koordinasi FORKOPIMDA



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020

Tabel 3.35 Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2			
Sasaran 2	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat		
IKU ^(3/33)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		
Satuan	Indeks		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
70	68,67	76	-

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat memiliki 1 indikator **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** dengan capaian sebesar 68,67 dari target sebesar 70 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kerjanya adalah **98,10%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 70%.



Tabel 3.36 Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3			
Sasaran 3	Meningkatnya Pelestarian Budaya		
IKU ^(4/33)	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh kementerian		
Satuan	Angka		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
45	50	100	-

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya pelestarian budaya memiliki 1 indikator **Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh kementerian** dengan capaian sebesar 50 dari target sebesar 45 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **111,11%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 45%.

Gambar 3.8 Pembangunan Kebudayaan



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020



Tabel 3.36 Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4			
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi		
IKU ^(5/33)	Nilai RB		
Satuan	Predikat		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
CC	B	A	-

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi memiliki 1 indikator **Nilai Reformasi Birokrasi** dengan capaian sebesar B dari target sebesar CC yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100,1%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 75,06%.

Gambar 3.9 Penataan Aparatur



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020

Beberapa yang menjadi penghambat dalam meningkatkan nilai RB Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Tim RB Perangkat Daerah Provinsi Lampung belum terimplementasi dengan baik dan masih bersifat formalitas sehingga belum menyentuh perubahan mendasar terkait pola pikir dan budaya kerja;
2. Penggunaan e-government dalam layanan publik belum maksimal, SOP Pelayanan belum dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil survei kepuasan masyarakat belum dipublikasikan;
3. Kebijakan tentang SPIP belum terimplementasi dalam SOP, penempatan SDM, manajemen resiko dan lainnya.



Tabel 3.37 Pencapaian Sasaran 5.1

Sasaran 5			
Sasaran 5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja		
IKU ^(6/33)	Opini BPK/WTP		
Satuan	Opini		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
WTP	WTP	WTP	-

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja memiliki 2 indikator. Indikator pertama adalah **Opini BPK/WTP** dengan capaian opini WTP dari target opini WTP yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kerjanya adalah **100%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 100%.

Gambar 3.10 Pengelolaan Keuangan



PENGELOLAAN KEUANGAN



Terjadi defisit pembiayaan pembangunan sebesar Rp. 1,7 Triliun yang disebabkan oleh:

- Target PAD yang tidak tercapai
- Pembiayaan pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
- Belum dibayarkannya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kepada kabupaten kota

Peningkatan PAD melalui

- Tarif tunggal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Rp. 1,6 T menjadi Rp. 1,7 T
- Penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerbitan NPWP Lokal untuk peningkatan Dana Bagi Hasil melalui transfer pusat
- Upaya-upaya untuk membangun data base wajib pajak yang akurat
- Perbaikan tata kelola Pendapatan Daerah
- Mendirikan UPT-UPT baru untuk meningkatkan pelayanan.
- Menetapkan Perda baru tentang pajak dan retribusi daerah

Melakukan penghematan belanja pada perubahan APBD 2019 baik belanja publik maupun belanja aparatur yang kurang prioritas

Mendorong pelaksanaan proyek-proyek strategis di Provinsi Lampung melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Melakukan pembayaran/realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten/Kota sehingga tersisa 2 triwulan

Participation Interest dengan PT Pertamina terkait pengelolaan sumur minyak di pantai timur

Sumber: BAPPEDA, Maret 2020.



Tabel 3.38 Pencapaian Sasaran 5.2

Sasaran 5			
Sasaran 5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja		
IKU ^(7/33)	Nilai SAKIP		
Satuan	Predikat		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
B	B	A	-

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Februari 2020

Gambar 3.11 Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi 2019

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja memiliki 2 indikator. Indikator kedua adalah **Nilai SAKIP** dengan capaian predikat B dari target predikat B yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 79,75%.



Sumber: Biro Organisasi, Maret 2020

Beberapa faktor penghambat dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Belum ada peta proses bisnis dengan mengacu pada pohon kinerja guna menghasilkan gambaran proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi. Proses bisnis ini selanjutnya digunakan untuk memastikan bahwa penjabaran kinerja yang sudah disusun secara berjenjang saling terkait satu sama lain;
2. Kualitas evaluasi penerapan akuntabilitas baik internal maupun pada pemerintah kabupaten/kota belum tergambar penerapan SAKIP yang objektif dan kurangnya monitoring terhadap tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sehingga evaluasi ini dapat memberikan perbaikan yang nyata kepada perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam menerapkan SAKIP;



- 3. Kuranya komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian SAKIP sebagai sarana pemberitahuan kinerja oleh pimpinan yang sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Tabel 3.39 Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6			
Sasaran 6	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat		
IKU(8/33)	Indeks Kepuasan Masyarakat		
Satuan	Predikat		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
C	B	A	-

Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat memiliki 1 indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan capaian sebesar B dari target sebesar C yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **108,14%** dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan capai target yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 93,07%.

Gambar 3.12 Pelayanan Publik



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020



Tabel 3.40 Pencapaian Sasaran 7

Sasaran 7			
Sasaran 7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)		
IKU _(9/33)	Angka Harapan Hidup		
Satuan	Tahun		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
72	70,18	72,48	-

Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki 1 indikator **Angka harapan hidup** dengan capaian sebesar 70,18 tahun dari target sebesar 72 tahun yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,47% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 96,83%.

Tabel 3.41 Pencapaian Sasaran 8.1

Sasaran 8			
Sasaran 8	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah		
IKU _(10/33)	Harapan Lama Sekolah		
Satuan	Tahun		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
12,55	12,61	12,92	-

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah memiliki 2 indikator. Indikator pertama adalah **harapan lama sekolah** dengan capaian sebesar 12,61 tahun dari target sebesar 12,55 tahun yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,48% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 97,60%.

Gambar 3.13 IPM Lampung



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020.

Tabel 3.42 Pencapaian Sasaran 8.2

Sasaran 8			
Sasaran 8	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah		
IKU _(11/33)	Rata-rata Lama Sekolah		
Satuan	Tahun		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
7,7	7,82	8,2	-

Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah memiliki 2 indikator. Indikator kedua adalah **harapan lama sekolah** dengan capaian sebesar 7,82 tahun dari target sebesar 7,7 tahun yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,56% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 95,37%.

Tabel 3.43 Pencapaian Sasaran 9.1

Sasaran 9			
Sasaran 9	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas		
IKU _(12/33)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
Satuan	Indeks		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
90,8	90,39	91,95	-

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas memiliki 4 (empat) indikator. Indikator pertama adalah **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** dengan capaian indeks sebesar 90,39 dari target indeks 90,8 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,55% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun tidak capai target yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 98,30%.



Tabel 3.44 Pencapaian Sasaran 9.2

Sasaran 9			
Sasaran 9	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas		
IKU _(13/33)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
Satuan	Indeks		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
64,03	63,82	65,08	-

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas memiliki 4 (empat) indikator. Indikator kedua adalah **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** dengan capaian indeks sebesar 63,82 dari target indeks 64,03 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,67% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 98,06%.

Tabel 3.45 Pencapaian Sasaran 9.3

Sasaran 9			
Sasaran 9	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas		
IKU _(14/33)	Jumlah Kabupaten/Kota yang layak anak		
Satuan	Kabupaten/Kota		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	7	15	-

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas memiliki 4 (empat) indikator. Indikator ketiga adalah **Jumlah Kabupaten/Kota yang layak anak** dengan capaian sebesar 7 Kabupaten/Kota dari target indeks 5 Kabupaten/Kota yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 140% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 46,67%.



Tabel 3.46 Pencapaian Sasaran 9.4

Sasaran 9			
Sasaran 9	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas		
IKU ^(15/33)	Persentase penyandang disabilitas yang mandiri		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
1,86	0,72	4,49	-

Sumber: Dinas Sosial, Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas memiliki 4 (empat) indikator. Indikator keempat adalah **Persentase penyandang yang mandiri** dengan capaian sebesar 0,72% dari target sebesar 1,86% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 39% dengan kategori kinerja **Sangat Rendah** namun **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 16,04%. Beberapa hal yang menyebabkan ketidaktercapaian target ini adalah faktor SDM secara kualitas dan kuantitas belum mampu mengembangkan *outcome* program kegiatan dalam upaya peningkatan kemandirian penyandang disabilitas. Selain itu penetapan target dengan kondisi SDM saat ini sangat tidak memungkinkan tercapai.

Tabel 3.47 Pencapaian Sasaran 10

Sasaran 10			
Sasaran 10	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)		
IKU ^(16/33)	Peringkat pada Event Olahraga, Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)		
Satuan	Peringkat		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	12	3	-

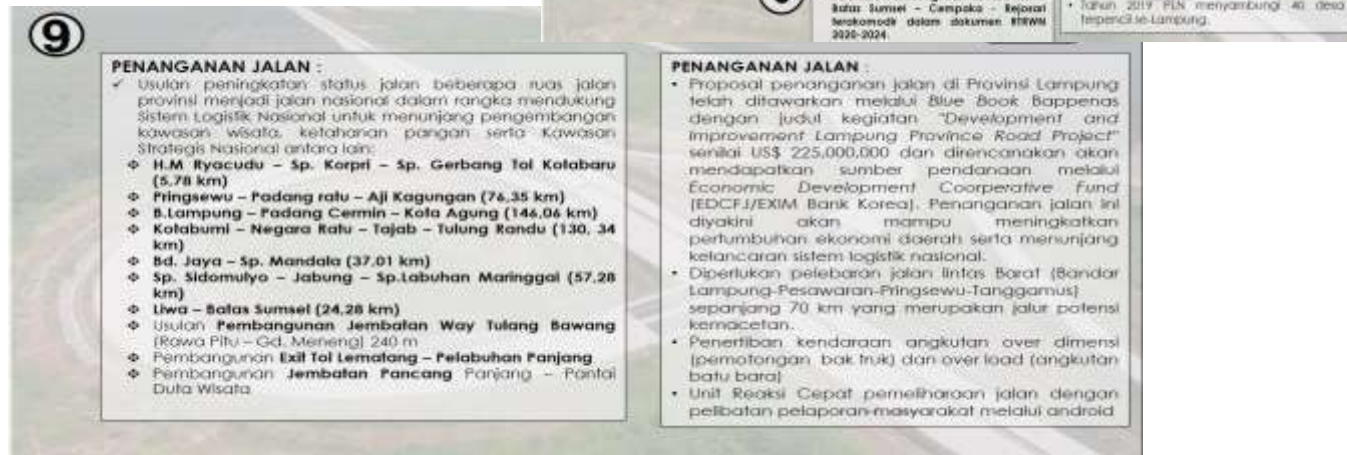
Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya) memiliki 1 (satu) indikator **peringkat pada event olahraga, pelajar regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)** dengan capaian peringkat ke 12 dari target peringkat ke 4 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 33% dengan kategori kinerja **Sangat Rendah** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 25%. Ketidaktercapaian IKU ini dikarenakan penetapan target IKU yang kurang mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sehingga reviu target pada IKU ini sangat diharapkan sehingga lebih rasional dan memotivasi dalam pencapaian target.



dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 90,10%.

Gambar 3.16 Perkembangan Konektivitas



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020.

Tabel 3.50 Pencapaian Sasaran 13

Sasaran 13			
Sasaran 13	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang		
IKU(19/33)	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
93	95,76	98	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang memiliki 1 (satu) indikator **rasio elektrifikasi rumah tangga** dengan capaian 95,76% dari target 93% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 97,71%.



Tabel 3.51 Pencapaian Sasaran 14

Sasaran 14			
Sasaran 14	Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air		
IKU ^(20/33)	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
33	29	55	-

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air memiliki 1 (satu) indikator **indeks persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2** dengan capaian 29% dari target indeks 33% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 87,88% dengan kategori kinerja **Tinggi** dan tidak capai target yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 52,73.

Beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat realisasi pada indikator sasaran ini adalah:

1. Faktor pendukung: adanya SDM yang berkomitmen tinggi, regulasi pengelolaan SDA dan Pembangunan infrastruktur SDA, lembaga koordinasi SDA serta koordinasi dan partisipasi masyarakat guna mengendalikan potensi konflik dan menjamin keberlanjutan SDA.
2. Faktor penghambat: Kondisi infrastruktur sumber daya air dan bangunan irigasi mengalami kerusakan terutama di Daerah Irigasi (D.I) dan rawa yang menjadi kewenangan Provinsi (1000- 3000 Ha) dan sebagian D.I. yang menjadi kewenangan Pusat (>3000 Ha), terjadinya alih fungsi lahan irigasi teknis yang semakin signifikan, terbatasnya jaminan kelangsungan pemberian air di daerah irigasi teknis yang penyediaan airnya dijamin oleh waduk, terbatasnya kemampuan pemeliharaan jaringan irigasi, menyebabkan semakin menurunnya kinerja layanan prasarana irigasi, lemahnya pengelolaan data dan informasi SDA.

Dalam implementasinya beberapa solusi yang telah dilaksanakan adalah merumuskan regulasi untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam menjaga ketersediaan air untuk irigasi, peningkatan kapasitas personel dan



masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana irigasi serta optimalisasi sistem informasi jaringan irigasi daerah.

Tabel 3.52 Pencapaian Sasaran 15.1

Sasaran 15			
Sasaran 15	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Kawasan yang Layak dan Aman		
IKU ^(21/33)	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
71,5	73,3	80,34	-

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan yang layak dan aman memiliki 4 (empat) indikator. Indikator pertama **persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman** dengan capaian 73,3% dari target 71,5% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 10252% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 91,24%.

Tabel 3.53 Pencapaian Sasaran 15.2

Sasaran 15			
Sasaran 15	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Kawasan yang Layak dan Aman		
IKU ^(22/33)	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses sanitasi		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
66,41	52,48	80,34	-

Sumber: Dinas PSDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan yang layak dan aman memiliki 4 (empat) indikator. Indikator kedua **persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi** dengan capaian 52,48% dari target 66,41% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 79,02% dengan kategori kinerja **Sedang** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 66,7%.



Tabel 3.54 Pencapaian Sasaran 15.3

Sasaran 15			
Sasaran 15	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Kawasan yang Layak dan Aman		
IKU ^(23/33)	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
0,52	0,53	0,37	-

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung, Februari 2020

Gambar 3.17 Kawasan Kumuh

PERUMAHAN dan KAWASAN KUMUH

- Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Lampung sebesar 1.187,12 Ha (verifikasi Pusat) atau sebesar 1.376,93 Ha (SK Bupati/Walikota). Dari jumlah tersebut, rencana Pengurangan Kawasan Kumuh sebesar 844,18 Ha dimana Porsi Penanganan Provinsi Lampung adalah sebesar 190 Ha.
- Sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni s.d Tahun 2018 dari data BDT dari jumlah RTLH 93.752 telah tertangani sebanyak 14.513 unit dengan demikian s.d tahun 2024 masih terdapat target pengentasan sebesar 79.829 unit RTLH

PROGRAM 100 0 100

WATER ACCESS SLUM AREA SANITATION

GLOBAL ACCES

No	Global Acces	Jumlah Penduduk	Penduduk Yg Memiliki Akses s.d Th 2018	% Capaian	Target s.d 2024	Sisa (target capaian)
1	Akses Layanan Air Minum	8.370.485	5.987.447	71,65%	80,34%	8.66%
2	Akses Layanan Sanitasi	8.370.485	5.409.527	64,63%	85%	20,37%
3	Akses Layanan Limbah Domestik	8.289.217*	5.251.736*	62,97%	100%	37,03%
4	Akses Layanan Persampahan	8.289.217*	4.337.960	53,84%	100%	46,16%

PERANGANAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN/ OPEN DEFECATION FREE (ODF)

- Telah terjadi penurunan BABS sejak tahun 2014 pada angka 26%, tahun 2015 pada angka 24,8%, tahun 2016 pada angka 11,08% dan pada tahun 2017 pada angka 8,2%.
- Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah mendeklarasikan Open Defecation Free (ODF) sebab wilayahnya telah 100 persen bebas buang air sembarangan (BABS) yaitu:
 - Kabupaten Pringsewu, deklarasi pada tanggal 29 Desember 2017
 - Kabupaten Way Kanan, deklarasi pada tanggal 22 Maret 2019
 - Kota Metro, deklarasi pada tanggal 15 November 2019
 - Kabupaten Lampung Selatan, deklarasi pada tanggal 07 Desember 2019

Sumber: BAPPEDA, Maret 2020

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan yang layak dan aman memiliki 4 (empat) indikator. Indikator ketiga **persentase penurunan luasan kawasan kumuh** dengan capaian 0,53% dari target 0,52% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 69,81%

dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 69,81%.



Tabel 3.55 Pencapaian Sasaran 15.4

Sasaran 15			
Sasaran 15	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Kawasan yang Layak dan Aman		
IKU ^(24/33)	Persentase rumah tidak layak huni		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
4,5	4,67	1,03	-

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan yang layak dan aman memiliki 4 (empat) indikator. Indikator keempat **persentase rumah tidak layak huni** dengan capaian 4,5% dari target 4,67% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,36% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 22,06%.

Tabel 3.56 Pencapaian Sasaran 16

Sasaran 16			
Sasaran 16	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian		
IKU ^(25/33)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
0,93	1,34	3,19	-

Sumber: BPS, BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian memiliki 1 (satu) indikator **pertumbuhan PDRB sektor pertanian** dengan capaian 0,93% dari target 1,34% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 144,09% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 42,01%.

Gambar 3.18 Produksi Sektor Pertanian



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020



Tabel 3.57 Pencapaian Sasaran 17.1

Sasaran 17			
Sasaran 17	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan		
IKU ^(26/33)	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
7,46	8,26	6,33	-

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan memiliki 2 (dua) indikator pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dengan capaian 8,26% dari target 7,46% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110,72% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 130,49%.

Gambar 3.19: Industri Pengolahan



PEMBANGUNAN POLITEKNIK INDUSTRI AGRO

Basis Industri di Provinsi Lampung adalah Industri Agro. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Industri yang berbasis kompetensi pada saat ini dan yang akan datang, menjadi prioritas kebijakan untuk pembangunan Politeknik Industri Agro di Provinsi Lampung.



Kebutuhan Kompetensi SDM Industri Agro, antara lain :

- PPIC/Production Planning and Inventory Control (Supervisor & Teknisi Operasional Produksi dan Kualitas, Perencana/junior engineer pada Proses Produksi);
- Quality Control
- Perancang Tata Letak Fasilitas Pabrik
- Analisis Kelayakan Pabrik
- Perancang Sistem Kerja
- Manajemen Logistik
- Entrepreneur (Business Owner)

Pembangunan Politeknik Agro oleh Kementerian Perindustrian akan dimulai pada Tahun 2020

Sumber: BAPPEDA, Maret 2020



Tabel 3.58 Pencapaian Sasaran 17.2

Sasaran 17			
Sasaran 17	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan		
IKU _(27/33)	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
5,24	7,23	10,73	-

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan memiliki 2 (dua) indikator **pertumbuhan PDRB sektor perdagangan** dengan capaian 7,23% dari target 5,24% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 137,98% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 67,38%.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung: pengoperasian jalan Tol Trans Sumatera mendorong aktivitas perdagangan antar daerah menjadi lebih meningkat, Kenaikan permintaan domestik, Perkembangan e-commerce yang pesat, Perkembangan bisnis Franchise gerai makanan dan minuman, Penyelenggaraan festival budaya dan pekan raya ikut meningkatkan aktifitas perdagangan.
2. Faktor penghambat: Volume perdagangan dunia yang menurun ikut mempengaruhi kinerja sektor perdagangan, Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor dan perluasan pasar ekspor.

Solusi yang dapat menjadi referensi menghadapi kondisi seperti di atas adalah dengan meningkatkan kualitas produk - produk unggulan serta melakukan diversifikasi produk Provinsi Lampung untuk mengatasi penurunan perdagangan dunia, mengoptimalkan perkembangan e-commerce dengan memberikan pelatihan ataupun fasilitasi bagi PKM untuk dapat memanfaatkan e-commerce dalam menjalankan kegiatan usahanya serta Melakukan kegiatan peningkatan citra produk - produk unggulan Lampung baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.



Tabel 3.59 Pencapaian Sasaran 18

Sasaran 18			
Sasaran 18	Menjaga stabilitas harga		
IKU ^(28/33)	Laju Inflasi		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,0	3,44	3-3,5	-

Sumber: BPS, Februari 2020

Sasaran meningkatnya menjaga stabilitas harga memiliki 1 (satu) indikator **laju inflasi** dengan capaian 3,44% dari target 3% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 87,21% dengan kategori kinerja **Tinggi** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 87,21%.

Gambar 3.20 Laju Inflasi Lampung



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020



Tabel 3.60 Pencapaian Sasaran 19

Sasaran 19			
Sasaran 19	Menurunnya kemiskinan		
IKU ^(29/33)	Angka Kemiskinan		
Satuan	Persentase		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
12	12,3	9,18	-

Sumber: BPS, Februari 2020

Sasaran meningkatnya menurunnya kemiskinan memiliki 1 (satu) indikator **angka kemiskinan** dengan capaian 12,3% dari target 12% yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,56% dengan kategori kinerja **Sangat Tinggi** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 74,63%.

Gambar 3.21 Indeks Kemiskinan Lampung



Sumber: BAPPEDA, Maret 2020



Tabel 3.61 Pencapaian Sasaran 20

Sasaran 20			
Sasaran 20	Mengurangi ketimpangan antar wilayah		
IKU _(30/33)	Indeks Williamson		
Satuan	Indeks		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
0,21	0,245	0,19	-

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran mengurangi ketimpangan antar wilayah memiliki 1 (satu) indikator **indeks williamson** dengan capaian indeks 0,245 dari target indeks 0,21 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 85,71% dengan kategori kinerja **Tinggi** dan **tidak capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 77,55%.

Tabel 3.62 Pencapaian Sasaran 21

Sasaran 21			
Sasaran 21	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat		
IKU _(31/33)	PDRB perkapita (Juta)		
Satuan	Rupiah		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
42,94	42,69	56,00	-

Sumber: BPS, Februari 2020

Sasaran menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat memiliki 1 (satu) indikator **PDRB perkapita (Juta)** dengan capaian 42,69 dari target 42,94 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,42% dengan kategori kinerja **Tinggi** namun tidak **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 76,23%.



Tabel 3.63 Pencapaian Sasaran 22

Sasaran 22			
Sasaran 22	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
IKU _(32/33)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
Satuan	Indeks		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
57,13	59,28	63,32	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Februari 2020

Gambar 3.22 Pembangunan Lingkungan Hidup



Sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki 1 (satu) indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dengan capaian 59,28 dari target 57,13 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,76% dengan kategori kinerja Sangat **Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 93,62%.

Sumber: BAPPEDA, Maret 2020

Tabel 3.64 Pencapaian Sasaran 23

Sasaran 23			
Sasaran 23	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		
IKU _(33/33)	Indeks Resiko Bencana		
Satuan	Indeks		
2019		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
144,9	144,9	143,1	-

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2020

Sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki 1 (satu) indikator **Indeks Resiko Bencana** dengan capaian 144,9 dari target 144,9 yang direncanakan **dalam perjanjian kinerja tahun 2019** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori kinerja Sangat **Tinggi** dan **capai target** yang **diperjanjikan**. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 98,76%.



3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.2.671.745.701.343,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.2.453.662.321.303,68. (91,84%).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2019 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.65 Pagu dan Realisasi Anggaran 2019

No.	Misi	Pagu Anggaran APBD-P (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
1	Misi I: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	75.261.975.156,00	71.031.059.812	94,38
2	Misi II: Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan public	609.336.753.041,00	569.886.068.485	93,53
3	Misi III: Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel	1.086.836.967.804,00	1.004.638.367.287	92,44
4	Misi IV: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah	801.369.893.510,00	717.630.042.005	89,55
5	Misi V: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	79.407.476.542,00	71.972.866.452	90,64
6	Misi VI: Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama	19.532.635.290,00	18.148.656.822	92,91
JUMLAH TOTAL ANGGARAN		2.671.745.701.343,00	2.453.662.321.303,68	91,84

Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran APBD-P BAKUDA Provinsi Lampung per tanggal Maret 2020



Perincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan program urusan OPD Berdasarkan dokumen realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung per Maret 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.66 Perincian Pagu Realisasi Anggaran 2019

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU ANGGARAN PERDA 10/19 APBD-P 2019	REALISASI ANGGARAN S.D TW IV	SILPA	%
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.877.158.789.410,00	1.720.160.087.517,01	156.998.701.892,99	91,64%
1.01	Pendidikan	650.161.268.710,00	590.423.435.354,00	59.737.833.356,00	90,81%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	650.161.268.710,00	590.423.435.354,00	59.737.833.356,00	90,81%
1.02	Kesehatan	422.624.932.334,00	401.524.284.157,01	21.100.648.176,99	95,01%
	Dinas Kesehatan	85.901.078.108,00	80.589.633.258,29	5.311.444.849,71	93,82%
	Rumah Sakit Abdul Moeloek	313.620.580.369,00	301.371.625.206,72	12.248.955.162,28	96,09%
	Rumah Sakit Jiwa	23.103.273.857,00	19.563.025.692,00	3.540.248.165,00	84,68%
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	617.489.987.400,00	559.534.466.943,00	57.955.520.457,00	90,61%
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	597.330.419.000,00	541.598.233.531,00	55.732.185.469,00	90,67%
	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan SDA	19.887.898.000,00	17.673.683.012,00	2.214.214.988,00	88,87%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	271.670.400,00	262.550.400,00	9.120.000,00	96,64%
1.04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	170.199.267.500,00	152.508.281.343,00	17.690.986.157,00	89,61%
	Dinas Kesehatan	142.120.000,00	0,00	142.120.000,00	0,00%
	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan SDA	139.843.000.000,00	129.415.623.147,00	10.427.376.853,00	92,54%
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.214.147.500,00	23.092.658.196,00	7.121.489.304,00	76,43%
1.05	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.730.894.016,00	8.473.789.871,00	257.104.145,00	97,06%
	Badan Penanggulangan Bencana	1.765.921.190,00	1.742.739.987,00	23.181.203,00	98,69%
	Satpol PP	6.964.972.826,00	6.731.049.884,00	233.922.942,00	96,64%
1.06	Sosial	7.952.439.450,00	7.695.829.849,00	256.609.601,00	96,77%
	Dinas Sosial	7.952.439.450,00	7.695.829.849,00	256.609.601,00	96,77%
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	67.290.941.613,00	57.571.694.204,00	9.719.247.409,00	85,56%
2.01	Tenaga Kerja	4.858.944.000,00	4.392.525.368,00	466.418.632,00	90,40%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.858.944.000,00	4.392.525.368,00	466.418.632,00	90,40%
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.596.593.960,00	3.579.057.633,00	17.536.327,00	99,51%
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.596.593.960,00	3.579.057.633,00	17.536.327,00	99,51%
2.03	Pangan	3.736.440.415,00	3.714.057.650,00	22.382.765,00	99,40%
	Dinas Ketahanan Pangan	3.736.440.415,00	3.714.057.650,00	22.382.765,00	99,40%
2.05	Lingkungan Hidup	3.743.311.600,00	2.559.471.056,00	1.183.840.544,00	68,37%
	Dinas Lingkungan Hidup	3.743.311.600,00	2.559.471.056,00	1.183.840.544,00	68,37%
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.123.759.501,00	1.504.616.916,00	619.142.585,00	70,85%
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.123.759.501,00	1.504.616.916,00	619.142.585,00	70,85%
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.421.023.400,00	5.349.703.885,00	71.319.515,00	98,68%
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.421.023.400,00	5.349.703.885,00	71.319.515,00	98,68%
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	316.600.091,00	270.078.519,00	46.521.572,00	85,31%
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	316.600.091,00	270.078.519,00	46.521.572,00	85,31%
2.09	Perhubungan	7.833.170.610,00	3.049.773.181,00	4.783.397.429,00	38,93%
	Dinas Perhubungan	7.833.170.610,00	3.049.773.181,00	4.783.397.429,00	38,93%
2.10	Komunikasi dan Informatika	9.091.169.612,00	8.789.735.537,00	301.434.075,00	96,68%
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.091.169.612,00	8.789.735.537,00	301.434.075,00	96,68%
2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.557.216.296,00	4.214.955.452,00	342.260.844,00	92,49%
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.557.216.296,00	4.214.955.452,00	342.260.844,00	92,49%
2.12	Penanaman Modal	2.213.982.400,00	2.189.717.000,00	24.265.400,00	98,90%
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.213.982.400,00	2.189.717.000,00	24.265.400,00	98,90%
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	4.582.088.800,00	3.749.587.324,00	832.501.476,00	81,83%
	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.582.088.800,00	3.749.587.324,00	832.501.476,00	81,83%
2.14	Statistik	119.666.000,00	116.849.767,00	2.816.233,00	97,65%
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	119.666.000,00	116.849.767,00	2.816.233,00	97,65%

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU ANGGARAN PERDA 10/19 APBD-P 2019	REALISASI ANGGARAN S.D TW IV	SILPA	%
1	2	3	4	5	6
2.15	Persandian	189.799.178,00	186.486.112,00	3.313.066,00	98,25%
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	189.799.178,00	186.486.112,00	3.313.066,00	98,25%
2.16	Kebudayaan	11.702.073.070,00	11.317.136.510,00	384.936.560,00	96,71%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.702.073.070,00	11.317.136.510,00	384.936.560,00	96,71%
2.17	Perpustakaan	1.013.140.000,00	969.477.451,00	43.662.549,00	95,69%
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.013.140.000,00	969.477.451,00	43.662.549,00	95,69%
2.18	Kearsipan	2.191.962.680,00	1.618.464.843,00	573.497.837,00	73,84%
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.191.962.680,00	1.618.464.843,00	573.497.837,00	73,84%
3	URUSAN PILIHAN	85.993.124.741,00	75.758.308.228,00	10.234.816.513,00	88,10%
3.01	Kelautan dan Perikanan	8.114.611.123,00	7.983.459.923,00	131.151.200,00	98,38%
	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.114.611.123,00	7.983.459.923,00	131.151.200,00	98,38%
3.02	Pariwisata	9.867.821.860,00	9.807.383.586,00	60.438.274,00	99,39%
	Dinas Pariwisata	9.867.821.860,00	9.807.383.586,00	60.438.274,00	99,39%
3.03	Pertanian	39.325.025.479,00	33.324.007.321,00	6.001.018.158,00	84,74%
	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	27.038.831.359,00	26.719.071.283,00	319.760.076,00	98,82%
	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12.286.194.120,00	6.604.936.038,00	5.681.258.082,00	53,76%
3.04	Kehutanan	17.521.230.500,00	17.204.985.654,00	316.244.846,00	98,20%
	Dinas Kehutanan	17.521.230.500,00	17.204.985.654,00	316.244.846,00	98,20%
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral	5.847.468.000,00	2.537.520.538,00	3.309.947.462,00	43,40%
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.847.468.000,00	2.537.520.538,00	3.309.947.462,00	43,40%
3.06	Perdagangan	2.072.592.550,00	1.978.187.832,00	94.404.718,00	95,45%
	Dinas Perdagangan	2.072.592.550,00	1.978.187.832,00	94.404.718,00	95,45%
3.07	Perindustrian	2.636.375.229,00	2.617.422.984,00	18.952.245,00	99,28%
	Dinas Perindustrian	2.636.375.229,00	2.617.422.984,00	18.952.245,00	99,28%
3.08	Transmigrasi	608.000.000,00	305.340.390,00	302.659.610,00	50,22%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	608.000.000,00	305.340.390,00	302.659.610,00	50,22%
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	72.870.864.815,00	65.475.478.552,00	7.395.386.263,00	89,85%
4.01	Inspektorat	7.276.381.000,00	5.722.561.649,00	1.553.819.351,00	78,65%
	Inspektorat	7.276.381.000,00	5.722.561.649,00	1.553.819.351,00	78,65%
4.02	Perencanaan	8.390.634.500,00	7.609.758.553,00	780.875.947,00	90,69%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.390.634.500,00	7.609.758.553,00	780.875.947,00	90,69%
4.03	Kuangan	28.862.881.664,00	25.911.908.826,00	2.950.972.838,00	89,78%
	Badan Keuangan Daerah	9.142.167.359,00	7.673.458.114,00	1.468.709.245,00	83,93%
	Sekretariat Daerah	5.741.167.980,00	5.613.139.482,00	128.028.498,00	97,77%
	Badan Pendapatan Daerah	13.979.546.325,00	12.625.311.230,00	1.354.235.095,00	90,31%
4.04	Kepegawaian	265.568.000,00	265.210.310,00	357.690,00	99,87%
	Badan Kepegawaian Daerah	265.568.000,00	265.210.310,00	357.690,00	99,87%
4.05	Pendidikan dan Pelatihan	24.071.758.138,00	22.592.762.245,00	1.478.995.893,00	93,86%
	Rumah Sakit Abdul Moeloek	362.157.360,00	362.157.360,00	0,00	100,00%
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.281.000,00	113.428.464,00	61.852.536,00	64,71%
	Satpol PP	395.000.000,00	275.433.047,00	119.566.953,00	69,73%
	Dinas Pariwisata	16.836.000,00	16.836.000,00	0,00	100,00%
	Dinas Pemuda dan Olahraga	110.732.910,00	15.000.000,00	95.732.910,00	13,55%
	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	22.818.467.376,00	21.624.492.849,00	1.193.974.527,00	94,77%
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	99.175.000,00	93.444.525,00	5.730.475,00	94,22%
	Badan Penghubung	94.108.492,00	91.970.000,00	2.138.492,00	97,73%
4.06	Penelitian dan Pengembangan	2.351.204.511,00	2.338.200.289,00	13.004.222,00	99,45%
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.351.204.511,00	2.338.200.289,00	13.004.222,00	99,45%
4.07	Penghubung	1.652.437.002,00	1.035.076.680,00	617.360.322,00	62,64%
	Badan Penghubung	1.652.437.002,00	1.035.076.680,00	617.360.322,00	62,64%
				0,00	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU ANGGARAN PERDA 10/19 APBD-P 2019	REALISASI ANGGARAN S.D TW IV	SILPA	%
1	2	3	4	5	6
5	URUSAN PENDUKUNG	565.271.423.364,00	531.837.053.899,67	33.434.369.464,33	94,09%
5.01	Sekretariat Daerah	68.733.809.178,00	64.907.291.428,00	3.826.517.750,00	94,43%
	Sekretariat Daerah	68.733.809.178,00	64.907.291.428,00	3.826.517.750,00	94,43%
5.02	Sekretariat DPRD	84.014.751.577,00	82.274.343.562,00	1.740.408.015,00	97,93%
	Sekretariat DPRD	84.014.751.577,00	82.274.343.562,00	1.740.408.015,00	97,93%
5.03	Set Korpri	807.954.239,00	790.953.650,00	17.000.589,00	97,90%
	Badan Penyelenggara Korpri	807.954.239,00	790.953.650,00	17.000.589,00	97,90%
5.04	Non Urusan Eks BAU)	411.714.908.370,00	383.864.465.259,67	27.850.443.110,33	93,24%
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.713.230.700,00	7.190.347.793,00	522.882.907,00	93,22%
	Dinas Kesehatan	20.594.075.205,00	18.683.696.354,67	1.910.378.850,33	90,72%
	Rumah Sakit Abdul Moeloek	11.171.516.160,00	10.661.150.000,00	510.366.160,00	95,43%
	Rumah Sakit Jiwa	4.035.127.080,00	3.748.824.651,00	286.302.429,00	92,90%
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.984.404.500,00	47.306.373.580,00	678.030.920,00	98,59%
	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan SDA	23.813.150.000,00	22.616.597.691,00	1.196.552.309,00	94,98%
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.778.639.500,00	3.301.323.869,00	477.315.631,00	87,37%
	Badan Penanggulangan Bencana	2.019.283.810,00	1.799.161.737,00	220.122.073,00	89,10%
	Satpol PP	24.552.716.094,00	23.748.363.462,00	804.352.632,00	96,72%
	Dinas Sosial	2.126.212.000,00	2.055.872.637,00	70.339.363,00	96,69%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.105.972.000,00	2.913.002.529,00	192.969.471,00	93,79%
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.390.758.040,00	2.370.028.166,00	20.729.874,00	99,13%
	Dinas Ketahanan Pangan	1.713.559.585,00	1.610.507.100,00	103.052.485,00	93,99%
	Dinas Lingkungan Hidup	1.645.341.200,00	1.566.153.124,00	79.188.076,00	95,19%
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.231.211.408,00	1.834.489.366,00	396.722.042,00	82,22%
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.103.880.100,00	2.034.543.718,00	69.336.382,00	96,70%
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.841.702.730,00	4.803.789.191,00	37.913.539,00	99,22%
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.762.694.704,00	1.707.072.394,00	55.622.310,00	96,84%
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.936.893.800,00	4.720.457.306,00	216.436.494,00	95,62%
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.986.669.000,00	2.150.540.569,00	836.128.431,00	72,00%
	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.256.137.877,00	2.253.619.188,00	2.518.689,00	99,89%
	Dinas Pariwisata	2.686.894.950,00	2.642.986.390,00	43.908.560,00	98,37%
	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	6.099.811.238,00	5.989.526.286,00	110.284.952,00	98,19%
	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.853.573.880,00	2.645.138.286,00	208.435.594,00	92,70%
	Dinas Kehutanan	2.619.389.500,00	2.452.547.531,00	166.841.969,00	93,63%
	Dinas Perdagangan	2.859.686.400,00	2.751.289.439,00	108.396.961,00	96,21%
	Dinas Perindustrian	1.806.564.781,00	1.716.741.003,00	89.823.778,00	95,03%
	Inspektorat	2.657.841.000,00	2.337.026.882,00	320.814.118,00	87,93%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.938.346.100,00	4.744.028.212,00	194.317.888,00	96,07%
	Badan Keuangan Daerah	11.959.241.641,00	5.022.848.694,00	6.936.392.947,00	42,00%
	Badan Kepegawaian Daerah	6.161.525.350,00	5.282.169.593,00	879.355.757,00	85,73%
	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.657.743.800,00	4.363.740.316,00	294.003.484,00	93,69%
	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah	3.253.660.624,00	3.209.040.618,00	44.620.006,00	98,63%
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.834.117.347,00	1.749.499.602,00	84.617.745,00	95,39%
	Badan Penghubung	6.249.518.506,00	6.167.776.849,00	81.741.657,00	98,69%
	Sekretariat Daerah	82.966.332.230,00	81.970.019.013,00	996.313.217,00	98,80%
	Dinas Perhubungan	4.803.504.000,00	3.944.347.444,00	859.156.556,00	82,11%
	Badan Pendapatan Daerah	30.451.413.675,00	26.591.801.227,00	3.859.612.448,00	87,33%
	Sekretariat DPRD	45.985.248.423,00	43.350.542.642,00	2.634.705.781,00	94,27%
	Badan Penyelenggara Korpri	1.122.278.993,00	1.001.923.901,00	120.355.092,00	89,28%
	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	6.129.591.639,00	5.199.487.360,00	930.104.279,00	84,83%
	Badan Kesbangpol	1.855.448.800,00	1.656.069.546,00	199.379.254,00	89,25%



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAGU ANGGARAN PERDA 10/19 APBD-P 2019	REALISASI ANGGARAN S.D TW IV	SILPA	%
1	2	3	4	5	6
6	URUSAN KESBANGPOL	3.160.557.400,00	2.859.698.903,00	300.858.497,00	90,48%
6.01	Kesbangpol	3.160.557.400,00	2.859.698.903,00	300.858.497,00	90,48%
	Badan Kesbangpol	3.160.557.400,00	2.859.698.903,00	300.858.497,00	90,48%
TOTAL		2.671.745.701.343,00	2.453.662.321.303,68	218.083.380.039,32	91,84%

Sumber: Olahan Data BPKAD dan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi daerah serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2019. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian misi Pemerintah Provinsi Lampung dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.67. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA %	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1	MISI KE-1	4	100%	71.031.059.812	94,38
	Sangat Tinggi	4	100%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
	Sangat Rendah	-	-		
2	MISI KE-2	4	100%	569.886.068.485	93,53
	Sangat Tinggi	4	100%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
	Sangat Rendah	-	-		
3	MISI KE-3	9	100%	1.004.638.367.287	92,44
	Sangat Tinggi	7	100%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
	Sangat Rendah	2	-		
4	MISI KE-4	7	100%	717.630.042.005	89,55
	Sangat Tinggi	5	71,42%		
	Tinggi	1	14,28%		
	Sedang	1	14,28%		
	Rendah	-	-		
	Sangat Rendah	-	-		
5	MISI KE-5	7	100%	71.972.866.452	90,64
	Sangat Tinggi	5	71,42%		
	Tinggi	2	28,56%		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
	Sangat Rendah	-	-		
6	MISI KE-6	2	100%	18.148.656.822	92,91
	Sangat Tinggi	2	100%		
	Tinggi	-	-		
	Sedang	-	-		
	Rendah	-	-		
TOTAL REALISASI ANGGARAN APBD-P TAHUN 2019				2.453.662.321.303,68	91,84

Sumber: Olahan Data BPKAD dan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Maret 2020



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2019. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Pada tahun 2019 yang merupakan tahun peralihan masa jabatan kepala daerah, dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung adalah dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019 dan Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019 – 2024. Sedangkan Keputusan Gubernur terkait Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung tertuang pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/476/VI.01/HK/2017 tentang Penyempurnaan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Provinsi Lampung dalam menjalankan Visi “**Rakyat Lampung Berjaya**” yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 telah menetapkan 6 (enam) misi yaitu: (1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai; (2) Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik; (3) Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel; (4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah; (5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang



seimbang dengan wilayah perkotaan; (6) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan RPJMD 2015-2019, Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) Tujuan dengan 16 (enam belas) indikator tujuan; 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menopang 5 (lima) Misi Provinsi Lampung. Sedangkan RPJMD 2019-2024, Provinsi Lampung memiliki 7 (tujuh) Tujuan dengan 13 (tiga belas) Indikator Tujuan dan 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menopang 6 (enam) Misi Provinsi Lampung

Perincian tujuan, sasaran, indikator dan rata-rata pencapaian kinerja RPJMD 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan dan indikator tujuan:

- ✓ Tujuan 1 terdiri dari 3 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 100,32%
- ✓ Tujuan 2 terdiri dari 6 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 73,15%
- ✓ Tujuan 3 terdiri dari 1 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 101,56%
- ✓ Tujuan 4 terdiri dari 1 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 97,47%
- ✓ Tujuan 5 terdiri dari 1 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 100%
- ✓ Tujuan 6 terdiri dari 1 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 93%
- ✓ Tujuan 7 terdiri dari 1 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 95,61%
- ✓ Tujuan 8 terdiri dari 2 indikator tujuan dengan rata-rata capaian kinerja 95,57%

b. Sasaran dan indikator kinerja utama:

- ✓ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 90,85%
- ✓ Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator (9%) dengan rata-rata capaian kinerja 154,36%
- ✓ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 171,6%
- ✓ Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 103,47%
- ✓ Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 31,73%
- ✓ Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 99,49%
- ✓ Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 133,54%
- ✓ Sasaran 8 terdiri dari 2 indikator (9%) dengan rata-rata capaian kinerja 92,54%
- ✓ Sasaran 9 terdiri dari 3 indikator (13%) dengan rata-rata capaian kinerja 979,31%
- ✓ Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 114,88%
- ✓ Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator (9%) dengan rata-rata capaian kinerja 100,42%
- ✓ Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 97,47%
- ✓ Sasaran 13 terdiri dari 2 indikator (9%) dengan rata-rata capaian kinerja 100%
- ✓ Sasaran 14 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 94%



- ✓ Sasaran 15 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 95,61%
- ✓ Sasaran 16 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 91,14%
- ✓ Sasaran 17 terdiri dari 1 indikator (4%) dengan rata-rata capaian kinerja 100%

Sedangkan untuk perincian sasaran, indikator dan rata-rata pencapaian kinerja RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- ✓ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator (6,06%) dengan rata-rata capaian kinerja 100,91%
- ✓ Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 98,10%
- ✓ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 111,11%
- ✓ Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 100,1%
- ✓ Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator (6,06%) dengan rata-rata capaian kinerja 100%
- ✓ Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 108,14%
- ✓ Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 97,47%
- ✓ Sasaran 8 terdiri dari 2 indikator (6,06%) dengan rata-rata capaian kinerja 101,02%
- ✓ Sasaran 9 terdiri dari 3 indikator (12,12%) dengan rata-rata capaian kinerja 94,48%
- ✓ Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 33%
- ✓ Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 103,47%
- ✓ Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 100%
- ✓ Sasaran 13 terdiri dari 2 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 103%
- ✓ Sasaran 14 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 87,88%
- ✓ Sasaran 15 terdiri dari 1 indikator (12,12%) dengan rata-rata capaian kinerja 94,96%
- ✓ Sasaran 16 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 144,09%
- ✓ Sasaran 17 terdiri dari 1 indikator (6,06%) dengan rata-rata capaian kinerja 124,35%
- ✓ Sasaran 18 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 87,21%
- ✓ Sasaran 19 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 97,56%
- ✓ Sasaran 20 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 85,72%
- ✓ Sasaran 21 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 99,42%
- ✓ Sasaran 22 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 103,76%
- ✓ Sasaran 23 terdiri dari 1 indikator (3,03%) dengan rata-rata capaian kinerja 100%



Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.2.671.745.701.343,00** dan terealisasi anggaran sebesar **Rp.2.453.662.321.303,68 (91.84%)** dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2019 Provinsi Lampung kondisi anggaran adalah Silpa **Rp.218.083.380.039,32**.

Perincian Penggunaan anggaran pada setiap misi adalah sebagai berikut:

- ✓ Misi kesatu memiliki pagu anggaran sebesar Rp. **75.261.975.156,00** dan terealisasi sebesar Rp. **71.031.059.812,00 (94,38%)**;
- ✓ Misi kedua memiliki pagu anggaran sebesar Rp.**609.336.753.041,00** dan terealisasi sebesar Rp.**569.886.068.485,00 (93,53%)**;
- ✓ Misi ketiga memiliki pagu anggaran sebesar Rp.**1.086.836.967.804,00** dan terealisasi sebesar Rp.**1.004.638.367.287,00 (92,44%)**;
- ✓ Misi keempat memiliki pagu anggaran sebesar Rp.**801.369.893.510,00** dan terealisasi sebesar Rp.**717.630.042.005 ,00 (89,55%)**;
- ✓ Misi kelima memiliki pagu anggaran sebesar Rp.79.407.476.542,00 dan terealisasi sebesar Rp.71.972.866.452,00 (**90,64%**)
- ✓ Misi keenam memiliki pagu anggaran sebesar Rp. **19.532.635.290,00** dan terealisasi sebesar Rp. **18.148.656.822,00 (92.91%)**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Lampung Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran/potret kinerja Kepala Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung tercinta.

Telukbetung, Maret 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI



LAMPIRAN





GUBERNUR LAMPUNG

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. RIDHO FICARDO, M.Si**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Telukbetung, Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

A. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi Kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah				
1.	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung	1. Laju pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	Persen	4,48
2.	Peningkatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, UMKM dan Koperasi terhadap PDRB Provinsi Lampung	2. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Persen	7,46
		3. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	4,50
3.	Peningkatan pertumbuhan sub sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung	4. Laju pertumbuhan sub sektor perdagangan	Persen	5,24
4.	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas kerja	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,17
5.	Peningkatan penanaman modal (investasi) daerah;	6. Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga konstan	Persen	14,56
6.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata pada perekonomian daerah.	7. Rata-rata pengeluaran wisatawan	Juta	1,375

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Misi Kedua : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial				
7.	Peningkatan PAD	8. Laju pertumbuhan PAD	Persen	3.28
8.	Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana yang handal	9. Kondisi kemantapan jalan provinsi	Persen	85
		10. Tingkat penyediaan infrastruktur irigasi pertanian	Persen	100
9.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah, listrik)	11. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	Persen	100
		12. Tingkat kawasan permukiman kumuh	Persen	0
		13. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan permukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah)	Persen	100
10.	Meningkatnya rumah tangga yang berlistrik	14. Rasio elektrifikasi rumah tangga	Persen	83,47
Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan beragama yang Toleran				
11.	Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun	15. Angka rata - rata lama sekolah.	Tahun	7,70
		16. Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,70
12.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	17. Angka Harapan Hidup	Tahun	72

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
13.	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	18. Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	Predikat	Utama
		19. Provinsi Layak Anak	Kabupaten /Kota	5
14.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Keagamaan yang Toleran.	20. Peringkat penyelesaian konflik sosial tingkat nasional.	Peringkat	Terbaik Nasional
Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan				
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	21. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62
Misi Kelima : Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif				
16.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB
17.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	23. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP

B. PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
Misi Kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Memperkuat dan Kemandirian Daerah		
1	Program Urusan Pertanian	Rp. 50.569.533.000,-
2	Program Urusan Kelautan dan Perikanan	Rp. 33.843.749.000,-
3	Program Urusan Kehutanan	Rp. 3.131.250.000,-
4	Program Urusan Pangan	Rp. 6.150.000.000,-
5	Program Urusan Pariwisata	Rp. 12.294.284.000,-
6	Program Urusan Perindustrian	Rp. 3.885.166.000,-
7	Program Urusan Perdagangan	Rp. 5.507.541.000,-
8	Program Urusan Koperasi UKM	Rp. 6.915.858.000,-
9	Program Urusan Penanaman Modal	Rp. 7.189.671.000,-
10	Program Urusan Tenaga Kerja	Rp. 9.907.916.000,-
11	Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 8.184.037.000,-
12	Program Urusan Pendukung Non Urusan Eks (BAU)	Rp. 32.830.960.000,-
Jumlah Anggaran Misi I		Rp. 180.409.965.000,-
Misi Kedua : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial		
1	Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 1.050.068.090.000,-
2	Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp 19.842.787.000,-
3	Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 5.447.468.000,-

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
4	Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp	4.037.084.000,-
5	Program Urusan Pendukung Non Urusan Eks (BAU)	Rp	9.206.844.000,-
Jumlah Anggaran Misi II		Rp	1.088.602.273.000,-
Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan beragama yang Toleran			
1	Program Urusan Pendidikan	Rp	634.913.506.000,-
2	Program Urusan Perpustakaan	Rp	18.766.321.680,-
3	Program Urusan Kesehatan	Rp	612.427.864.000,-
4	Program Urusan Sosial	Rp	11.551.380.000,-
5	Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	7.187.352.000,-
6	Program Pendidikan dan Pelatihan	Rp	22.449.849.000,-
7	Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp	34.386.387.000,-
8	Program Urusan Pendukung Non Urusan Eks (BAU)	Rp.	5.920.884.000,-
Jumlah Anggaran Misi III		Rp	1.347.603.543.680,-
Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan			
1	Program Urusan Lingkungan Hidup	Rp	5.860.816.000,-
2	Program Urusan Kehutanan	Rp	17.831.890.000,-
3	Program Urusan Kelautan dan Perikanan	Rp.	5.100.000.000,-
Jumlah Anggaran Misi IV		Rp	28.792.706.000,-

NO	PROGRAM	ANGGARAN
Misi Kelima : Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Pemerintahan Yang Baik dan Antisipatif		
1	Program Urusan Fungsi Penunjang Inspektorat	Rp 9.734.222.000,-
2	Program Urusan Komunikasi dan Informatika	Rp 13.987.337.520,-
3	Program Urusan Kepegawaian	Rp 7.682.171.000,-
4	Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 14.314.216.000,-
5	Program Urusan Perencanaan Pembangunan	Rp 16.125.651.000,-
6	Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp 5.395.086.000,-
7	Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 1.153.800.000,-
8	Program Urusan Keuangan	Rp 22.601.409.000,-
9	Program Urusan Pendukung Sekretariat	Rp 142.573.208.000,-
10	Program Urusan Pendukung Non Urusan	Rp 112.917.066.000,-
	Jumlah Anggaran Misi V	Rp 346.484.166.520,-
	Jumlah Total Anggaran Misi I, II, III, IV dan V	Rp 2.991.892.654.200,-

Telukbetung, Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO, M.Si



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ARINAL DJUNAI DI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Telukbetung, Oktober 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI DI

A. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR LAMPUNG

Penyusunan lampiran perubahan perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja itu sendiri. Informasi yang disajikan dalam lampiran perubahan perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatannya.

Pada lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung yang telah ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan 6 (enam) misi, 7 (tujuh) tujuan dan didasarkan pada 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis Pemerintah Provinsi Lampung. Sasaran strategis tersebut diuraikan dalam 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja, target, program dan anggaran yang akan dicapai.

Dalam rangka mewujudkan 6 (enam) misi tersebut dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) program urusan wajib, 8 (delapan) program urusan pilihan, 7 (tujuh) program urusan pemerintahan fungsi penunjang, 6 (enam) urusan pendukung dan 1 (satu) urusan Kesbangpol dengan total pagu anggaran belanja dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.671.745.701.343- (*Dua Trilyun Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) dapat kami uraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Misi kesatu terdapat 5 (lima) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.261.975.156,-
2. Misi kedua terdapat 17 (tujuh belas) program urusan dan 1 (satu) program non urusan Eks (BAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp.609.336.753.041,-
3. Misi ketiga terdapat 6 (enam) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.086.836.967.804,-
4. Misi keempat terdapat 4 (empat) program urusan dengan pagu anggaran

sebesar Rp.801.369.893.510,-

5. Misi kelima terdapat 11 (sebelas) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp.79.407.476.542,-
6. Misi keenam terdapat 3 (tiga) program urusan dengan pagu anggaran sebesar Rp.19.532.635.290,-

Untuk melihat lebih rinci penjabaran dari program urusan pemerintahan dan pagu anggaran sebagaimana tersebut di atas maka kami sajikan pada lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

1. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai			
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	68,5
		2. Tingkat pertumbuhan kriminalitas	75,53
2.	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	70
3.	Meningkatnya pelestarian budaya	4. Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh kementerian	45
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik			
4.	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	5. Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	CC
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	6. Opini BPK/WTP (Opini)	WTP
		7. Nilai SAKIP	B
6.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	CC
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas			
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	9. Angka Harapan Hidup (Tahun)	72
8.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	10. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,55
		11. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,7

9.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	90,80
		13. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	64,03
		14. Jumlah Kab/Kota Layak Anak	5
		15. Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	1,86
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
10.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi dibidang olah raga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	16. Peringkat pada event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	4 (POPWIL)
11.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,17
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah			
12.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	18. Indeks Konektivitas	6,1
13.	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	19. Rasio elektrifikasi rumah tangga	93
14.	Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air	20. Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2	33
15.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat dan aman	21. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman	71,5
		22. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	66,41
		23. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0,52
		24. Persentase rumah tidak layak huni	4,50
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
16.	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	25. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	0,93

17.	meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	26. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7,46
		27. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,24
18.	Menjaga stabilitas harga	28. Laju Inflasi	3,0
19.	Menurunnya kemiskinan	29. Angka kemiskinan	12,0
20.	Mengurangi ketimpangan antar wilayah	30. Indeks <i>Williamson</i>	0,21
21.	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	31. PDRB perkapita (juta)	42,94
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
22.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	32. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,13
23.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	33. Indek Resiko Bencana	144,9

Sumber : RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung 2019 - 2024

2. PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai		
1	Program Urusan Kesbangpol	Rp. 3.160.557.400,-
2	Program Urusan Sekretariat Daerah	Rp. 43.566.550.000,-
3	Program Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp. 6.964.972.826,-
4	Program Urusan Kebudayaan	Rp. 11.702.073.070,-
5	Program Urusan Pariwisata	Rp. 9.867.821.860,-
JUMLAH		75.261.975.156,-

Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik

1	Program Urusan Kepegawaian	Rp	265.568.000,-
2	Program Urusan Penelitian dan Pengembangan	Rp	2.351.204.511,-
3	Program Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Rp	24.071.758.138,-
4	Program Urusan Penghubung	Rp.	1.652.437.002,-
5	Program Urusan Komunikasi dan Informatika	Rp.	9.091.169.612,-
6	Program Urusan Persandian	Rp.	189.799.178,-
7	Program Urusan Statistik	Rp.	119.666.000,-
NO	PROGRAM		ANGGARAN
8	Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp.	2.123.759.501,-
9	Program Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana	Rp.	316.600.091,-
10	Program Urusan Fungsi Penunjang Inspektorat	Rp.	7.276.381.000,-
11	Program Urusan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah	Rp.	23.681.334.578,-
12	Program Urusan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD	Rp.	84.014.751.577,-
13	Program Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan	Rp.	8.390.634.500,-
14	Program Urusan Fungsi Penunjang Sekretariat KORPRI	Rp.	807.954.239,-
15	Program Urusan Kearsipan	Rp.	2.191.962.680,-
16	Program Urusan Sekretariat Daerah Non Urusan Eks (BAU)	Rp.	411.714.908.370,-
17	Program Urusan Fungsi Penunjang Keuangan	Rp.	28.862.881.664,-
18	Program Urusan Penanaman Modal	Rp.	2.213.982.400,-

Jumlah Anggaran Misi 2		609.336.753.041,-	
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas			
1	Program Urusan Kesehatan	Rp.	422.624.932.334,-
2	Program Urusan Pendidikan	Rp.	650.161.268.710,-
3	Program Urusan Perpustakaan	Rp.	1.013.140.000,-
4	Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.	3.596.593.960,-
5	Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Rp.	4.582.088.800,-
6	Program Urusan Tenaga Kerja	Rp.	4.858.944.000,-
Jumlah Anggaran Misi 3		Rp	1.086.836.967.804,-
NO	PROGRAM	ANGGARAN	
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah			
1	Program Urusan Perhubungan	Rp	7.833.170.610,-
2	Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	617.489.987.400,-
3	Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.	5.847.468.000,-
4	Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	170.199.267.500
Jumlah Anggaran Misi 4		Rp	801.369.893.510,-
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
1	Program Urusan Pertanian	Rp	39.325.025.479,-
2	Program Urusan Pangan	Rp	3.736.440.415,-
3	Program Urusan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah	Rp.	1.485.924.600,-

4	Program Urusan Kelautan dan Perikanan	Rp.	8.114.611.123,-
5	Program Urusan Kehutanan	Rp.	3.497.828.000,-
6	Program Urusan Perindustrian	Rp.	2.636.375.229,-
7	Program Urusan Perdagangan	Rp.	2.072.592.550,-
8	Program Urusan Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp.	4.557.216.296,-
9	Program Urusan Transmigrasi	Rp,	608.000.000,-
10	Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	5.421.023.400,-
11	Program Urusan Sosial	Rp.	7.952.439.450,-
Jumlah Anggaran Misi 5		Rp.	79.407.476.542

NO	PROGRAM	ANGGARAN
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama		
1	Program Urusan Lingkungan Hidup	Rp. 3.743.311.600,-
2	Program Urusan Kehutanan	Rp. 14.023.402.500,-
3	Program Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 1.765.921.190,-
Jumlah Anggaran Misi 5		Rp. 19.532.635.290,-
Jumlah Keseluruhan Misi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6		Rp. 2.671.745.701.343,-

Telukbetung, Oktober 2019

GUBERNUR LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI DI